

L A P O R A N

Kinerja 20 Tahun Setara Institute

2025

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org

think ■
act ■
tolerate ■





KATA PENGANTAR

Para pembaca yang budiman,

SETARA Institute adalah perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, SETARA Institute melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, *rule of law*, dan perdamaian.

Kini, SETARA Institute telah sampai pada 2 dekade (20 tahun) umurnya. Dua puluh tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Bagi SETARA Institute, dua dekade ini merupakan rangkaian proses pembelajaran yang panjang—dari ruang riset, advokasi, pendidikan publik, hingga keterlibatan strategis di tingkat nasional dan internasional. Sejak didirikan pada tahun 2005, SETARA lahir dari kesadaran bahwa demokrasi tidak akan bertahan hanya dengan prosedur elektoral, tetapi memerlukan fondasi nilai: kesetaraan, kemanusiaan, dan kebebasan yang dijamin bagi setiap warga negara.

Laporan dua dekade ini bukan sekadar catatan historis, tetapi refleksi atas perjalanan intelektual dan praksis kami dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif. SETARA telah mengembangkan riset-riset penting tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, reformasi sektor keamanan, penegakan hukum dan konstitusi, pencegahan ekstremisme kekerasan, hingga transformasi kebijakan publik yang lebih responsif terhadap hak asasi manusia. Seluruh kerja ini berakar pada keyakinan bahwa pengetahuan yang dihasilkan secara independen memiliki daya ubah yang nyata terhadap struktur sosial dan politik.

Dalam perjalanan ini, SETARA Institute tidak pernah berjalan sendiri. Kami berterima kasih kepada para pendiri yang telah menanamkan visi dan nilai-nilai dasar kelembagaan; kepada seluruh staf dan peneliti yang terus mengembangkan dan mengaktualisasikan kapasitas intelektual melalui riset; kepada mitra yang terus menjaga semangat kerja-kerja advokasi; kepada para mitra pembangunan dan lembaga internasional yang telah mempercayai kredibilitas dan integritas kami; serta kepada publik dan masyarakat sipil yang menjadi sumber inspirasi dan alasan keberadaan kami.

Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, SETARA Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA Institute pasti harus mengeluarkan energi dan sumber daya berlipat menghadapi tantangan yang juga berlipat untuk menyelenggarakan berbagai kerja-kerja SETARA.

Terakhir, Atas nama seluruh keluarga besar SETARA Institute, kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga laporan ini menjadi pengingat bahwa kerja kemanusiaan tidak berhenti pada pencapaian, melainkan terus bergerak menuju cita-cita keadilan yang lebih luas.

Jakarta, 14 Oktober 2025

Direktur Eksekutif,

Halili Hasan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Pendirian SETARA Institute.....	1
1.2. Visi dan Misi Organisasi	3
1.3. Perkembangan Organisasi	5
BAB II	
RISET DAN ADVOKASI	7
2.1. Area Riset dan Advokasi SETARA Institute	7
2.1.1. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan <i>Preventing Violent Extremism</i>	7
2.1.2. <i>Rule of Law</i>	9
2.1.3. Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Manusia	10
2.1.4. Bisnis dan HAM	11
2.2. Capaian Strategis	13
2.2.1. Produk Pengetahuan Strategis	13
2.2.2. Indeks dan Laporan Berkala	15
2.2.3. Riset Tematik.....	20
2.2.4. Pengaruh Riset dan Advokasi SETARA terhadap Kebijakan Publik.....	26
2.2.5. Jejaring Nasional dan Internasional.....	27
2.2.6. Keterlibatan dalam Advokasi	29

BAB III	
TANTANGAN DAN PELUANG MASA KINI.....	33
3.1. <i>Human Rights, Democracy and Peace</i> di Fora Internasional dan Nasional	33
3.2. Strategi Komunikasi dan Gagasan Kreatif untuk Mendukung Isu HAM, Demokrasi dan Perdamaian.....	34
3.3. Demokrasi, HAM dan Keamanan dalam Perspektif Ke-Indonesia-an.....	35
3.4. Tantangan Mewujudkan Kemanusiaan, Keadilan dan Kesejahteraan di Papua	36
BAB IV	
KISAH PERUBAHAN (<i>IMPACT STORIES</i>)	39
BAB V	
AGENDA 2045 DAN VISI KE DEPAN	43
5.1. Rencana Strategis 2023-2026	43
5.2. Agenda Riset dan Advokasi Strategis ke Depan	47
5.2.1. Indeks Kota Toleran 2025	47
5.2.2. Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2025.....	47
5.2.3. Konferensi Kota Toleran (November 2025).....	48
5.2.4. BHAM dengan Univ Haluoelo (Oktober 2025)	48
5.2.5. Pengukuran Toleransi dan Harmoni di Kabupaten Mimika (2025-2030).....	48
5.2.6. IKT Kabupaten Muara Enim	48
BAB VI	
PENUTUP DAN PESAN KEBERLANJUTAN	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENDIRIAN SETARA INSTITUTE

SETARA Institute for Democracy and Peace (selanjutnya disebut SETARA Institute) adalah organisasi perhimpunan yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 2005 oleh 28 tokoh, pemikir, aktivis, dan orang-orang kunci yang memiliki akses dan pengaruh bagi pemajuan pengetahuan dan kebijakan publik. Dengan komposisi pendiri dan pengurus yang memiliki posisi strategis, membuat SETARA Institute dapat memberikan kontribusi dan pengaruh dalam diskursus publik (*public discourses*) pada bidang-bidang yang menjadi area kerja penelitian dan advokasi yang dilakukan SETARA Institute. Para tokoh yang berkontribusi sebagai pendiri SETARA Institute sebagai berikut:

Tabel 1
Pendiri SETARA Institute

1. Abdurrahman Wahid	15. Luhut Pangaribuan
2. Ade Rostiana S.	16. M. Chatib Basri
3. Azyumardi Azra	17. Muchlis
4. Bambang Widodo Umar	18. Pramono Anung W
5. Bara Hasibuan	19. Rachlan Nashidik
6. Benny K. Harman	20. Rafendi Jamin
7. Benny Soesetyo	21. Dwiyanto Prihartono
8. Bonar Tigor Naipospos	22. Robertus Robert
9. Budi Joehanto	23. Rocky Gerung
10. D. Taufan	24. Saurip Kadi
11. Despen Ompusunggu	25. Suryadi A. Radjab
12. Hendaridi	26. Syarif Bastaman
13. Ismail Hasani	27. Theodorus W. Koekeritz
14. Kamala Chandrakirana	28. Zumrotin KS

Sebagai organisasi riset dan advokasi kebijakan, SETARA Institute memiliki *core research* khusus dan menjawab kebutuhan aktual di tengah masyarakat. Pembentukannya pada tahun 2005 merupakan respon atas gejala menguatnya fundamentalisme, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama dan moralitas di banyak bidang yang mengancam pluralisme dan hak asasi manusia. SETARA Institute bekerja melalui basis Hak Asasi Manusia dan konstitusi, serta tidak masuk ke dalam aspek teologi agama-agama. SETARA Institute menjadi salah satu pelopor Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, yang memberikan pengaruh pada advokasi kebebasan beragama/berkeyakinan, pluralisme dan hak asasi manusia.¹

Sejak awal didirikan pada 2005, SETARA Institute meletakkan isu penghapusan diskriminasi menuju kesetaraan dalam segala aspek adalah kondisi yang menjadi *raison d'être* kehadiran perhimpunan ini. Sedangkan tata sosial politik yang demokratis merupakan infrastruktur dan kondisi politik yang memungkinkan kinerja penghapusan diskriminasi dalam suatu negara bisa beroperasi. Karena itu, penguatan tata sosial politik yang demokratis merupakan area yang juga menuntut intervensi. SETARA Institute meyakini bahwa kondisi tata sosial politik demokratis bisa jadi *in line* atau berada dalam satu saluran dengan keniscayaan penghapusan diskriminasi atas dasar apapun. Kondisi demokratis seharusnya juga tidak

memberikan tempat bagi menguatnya diskriminasi warga pada suatu negara.

Dengan mendasarkan pada nilai kesetaraan, kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi, SETARA Institute hadir sebagai ruang pemikiran kritis dan pusat inisiatif kebijakan yang mendorong terciptanya kehidupan sosial-politik yang lebih adil dan inklusif. Kami percaya bahwa masyarakat hanya dapat berkembang secara berkelanjutan jika setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang agama, etnis, gender, maupun latar belakang sosial.

Melalui pendekatan berbasis data, riset yang mendalam, dan advokasi yang strategis, SETARA Institute aktif menyuarakan kebijakan-kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan marjinal. SETARA juga mengembangkan inovasi digital sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi, meningkatkan literasi kebijakan, dan mendukung transformasi sosial yang berbasis teknologi. Di tengah tantangan intoleransi, diskriminasi, dan ketimpangan, SETARA Institute terus berkomitmen menjadi mitra masyarakat sipil dalam membangun tatanan sosial yang inklusif, bermartabat, dan menghormati keberagaman sebagai kekuatan bangsa.

1 Berbagai laporan SETARA Institute berkaitan dengan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia menjadi rujukan berbagai pihak, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Kementerian Luar Negeri USA dan negara lainnya, Kedutaan Besar negara-negara, lembaga pembangunan internasional, sejumlah badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi masyarakat sipil dunia, menjadi sejumlah pihak yang menjadikan data SETARA Institute sebagai rujukan. Begitupun di dalam negeri, mulai dari Presiden, DPR RI, Kementerian dan Lembaga, organisasi masyarakat sipil dan akademisi, kelompok rentan, media, hingga pemerintahan daerah menjadi pihak-pihak di dalam negeri yang juga memanfaatkan data SETARA.

1.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) yang disepakati saat pendirian organisasi, SETARA Institute memiliki visi: mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis. Untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam misi organisasi sebagai berikut:

1. Mempromosikan pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik di bidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik.
4. Melakukan pendidikan publik

Untuk memberikan kontribusi yang terukur pada perwujudan masyarakat setara, organisasi ini akan menjalankan peran:

1. Menyebarkan pengetahuan tentang toleransi dan kebebasan beragama/ berkeyakinan kepada masyarakat dengan berbagai produk pengetahuan termasuk melalui training dan dialog kebijakan dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan toleransi di Indonesia. Termasuk dalam upaya ini adalah keterlibatan Setara Institute dalam pencegahan konflik ekstremisme.
2. Mendorong efektivitas mekanisme akuntabilitas negara dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk dan terutama akses masyarakat pada keadilan, melalui penerbitan berbagai laporan pemantauan, menciptakan terobosan mekanisme yang efektif, dan dialog kebijakan dengan institusi-institusi yang memiliki mandat

pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

3. Memantau dan melaporkan kinerja kelembagaan demokrasi dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM pada Mahkamah Konstitusi, otoritas legislasi, dan institusi penegak hukum.
4. Mendorong kebijakan mitigasi pelanggaran HAM pada sektor ekonomi dengan mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan HAM.
5. Meningkatkan kemampuan SETARA Institute sebagai salah satu institusi riset dan advokasi kebijakan yang kredibel, berintegritas, akuntabel, dan berdaya guna bagi pemajuan HAM, demokrasi, dan perdamaian.

Sebagai langkah dalam upaya mewujudkan visi dan misi lembaga, SETARA Institute pada tahun 2017 telah merumuskan tujuan-tujuan strategis beserta indikator capaian.

- 1. Tujuan Strategis 1:** Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang toleransi dan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Indikator capaian dari tujuan strategis ini adalah:
 - a. Berkurangnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan;
 - b. Terbangunnya komunikasi *multistakeholders* pada daerah-daerah yang menjadi area kerja lembaga;
 - c. Meningkatnya pengetahuan sektor masyarakat tertentu yang telah ditetapkan, seperti kalangan guru, siswa, dan pemuda; dan

- d. Inisiatif-inisiatif bersama komunitas dalam memperkuat toleransi dan mencegah konflik atas dasar agama dan konflik ekstremisme.
2. **Tujuan Strategis 2:** Meningkatkan efektivitas mekanisme akuntabilitas negara dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk dan terutama akses masyarakat pada keadilan. Indikator capaian dari tujuan strategis ini adalah:
- Ketersediaan laporan pemantauan *up to date* tentang kinerja institusi HAM dan kinerja pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
 - Policy brief* yang ditujukan bagi institusi-institusi HAM dan pemerintah, yang memuat gagasan peningkatan efektivitas mekanisme akuntabilitas; dan
 - Adanya sejumlah terobosan yang ditawarkan oleh Setara Institute untuk meningkatkan mekanisme yang efektif bagi pemajuan HAM dan akses keadilan.
3. **Tujuan Strategis 3:** Terpantau dan terpublikasikannya kinerja kelembagaan demokrasi dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM pada Mahkamah Konstitusi, otoritas legislasi, dan institusi penegak hukum. Indikator capaian dari tujuan strategis ini adalah:
- Ketersediaan laporan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam pemajuan HAM;
 - Ketersediaan laporan *baseline study* akuntabilitas kinerja legislasi;
 - Ketersediaan laporan tentang kinerja lembaga-lembaga penegak hukum;
 - Policy brief* yang ditujukan pada institusi-institusi demokrasi dan institusi penegak hukum; dan
- e. Ketersediaan konsep dan *policy tools* akuntabilitas sosial pembangunan desa.
4. **Tujuan Strategis 4:** Tersedianya perangkat-perangkat advokasi dan perlindungan hak warga negara dari potensi pelanggaran HAM pada sektor ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Indikator capaian dari tujuan strategis ini adalah:
- Baseline study* regulasi dan praktik bisnis dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM pada sektor properti, industri kesehatan, dan industri ekstraktif;
 - Policy tools/* regulasi yang kondusif bagi penguatan adopsi prinsip bisnis dan HAM pada sektor properti, industri kesehatan, dan industri ekstraktif; dan
 - Adanya *corporate engagement* dalam promosi prinsip bisnis dan HAM.
5. **Tujuan Strategis 5:** Meningkatkan kemampuan dan keberlangsungan Setara Institute dalam kerja riset dan advokasi kebijakan yang kredibel, berintegritas, akuntabel, dan berdaya guna bagi pemajuan HAM, demokrasi, dan perdamaian. Indikator capaian dari tujuan strategis ini adalah:
- Jumlah staf peneliti meningkat;
 - Penyempurnaan *standard operational procedures (SOP)* sumber daya manusia, termasuk skema *internship*, promosi, dan peningkatan kapasitas staf;
 - Keterlibatan aktif sejumlah pemikir/peneliti eksternal dalam memproduksi laporan-laporan studi;
 - Ketersediaan dukungan pendanaan untuk menjalankan program-program yang direncanakan; dan

- e. Akseptasi dan akomodasi institusi HAM, lembaga demokrasi, dan institusi penegak hukum pada gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh SETARA Institute.

1.3. PERKEMBANGAN ORGANISASI

Sejak awal didirikan, SETARA Institute memiliki bekal jaringan luas dalam mengadvokasi berbagai isu yang menjadi mandatnya. Jaringan ini diperoleh dari pengalaman yang dimiliki oleh para pendiri lembaga ini, yang umumnya merupakan eksponen gerakan, pemikir, dan aktivis dalam pelbagai bidang. Kekuatan jaringan inilah yang selama 20 tahun berkontribusi dan menjadi kekuatan bagi SETARA Institute.

SETARA Institute memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari tiga kamar utama, Dewan Nasional yang berfungsi menjadi dewan konsultatif dan akademik; Badan Pengurus yang menjalankan peran kepengurusan organisasi; dan Badan Pelaksana yang menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan organisasi. Dewan Nasional dan Badan Pengurus adalah badan yang bertanggung jawab terhadap organisasi dan arah organisasi termasuk memastikan *sustainability* kelembagaan, *agenda-setting* riset setiap tahunnya.

Kepengurusan SETARA Institute telah mengalami perubahan pada semua kamar utama, baik Dewan Nasional, Badan Pengurus, maupun Badan Pelaksana. Pada tingkat Dewan Nasional, pergantian dilakukan pada posisi ketua karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi jabatan tersebut diteruskan oleh orang yang sama, disebabkan meninggal dunia. Sebagai penggantinya, individu yang menjadi Ketua Badan Pengurus naik sebagai Ketua Dewan Nasional, lalu individu yang menjadi Direktur Eksekutif naik menjadi Ketua Badan Pengurus. Manajer Riset kemudian naik menjadi Direktur Eksekutif di SETARA Institute.

Perkembangan SETARA Institute juga tidak terlepas dari ketersediaan *expertise* pada badan pendiri. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu ini berfungsi memastikan sistem penjaminan mutu riset dapat bekerja. Meskipun belum berjalan reguler, *expert forum* yang dibentuk oleh SETARA Institute untuk mendiskusikan rencana dan hasil-hasil kerja risetnya, selama ini menjadi instrumen utama untuk memastikan kualitas dan mutu riset yang diselenggarakan. Sementara diseminasi dan advokasi kebijakan dilakukan melalui konferensi pers, seminar, dan dialog kebijakan.

Dalam 10 tahun pertama lembaga ini berdiri, berbagai riset dan inovasi yang dilakukan telah memberikan kekuatan tersendiri bagi SETARA Institute sebagai salah satu organisasi yang dikenal masyarakat. Kondisi tersebut berkontribusi dalam memudahkan SETARA Institute dalam menjalankan kerja-kerja kelembagaan, karena publik maupun pemerintah telah memberikan atensi. SETARA Institute juga memiliki kultur bahwa perencanaan seluruh riset dilakukan melalui suatu proses objektivikasi akademik, baik dalam bentuk *expert meeting*, *peer review*, maupun konferensi ilmiah yang secara reguler dilaksanakan. Proses ini terus dijalankan dengan berbagai penguatan yang dilakukan, termasuk pelibatan ahli-ahli maupun mitra terkait yang relevan dengan topik penelitian

Diseminasi juga menjadi kegiatan pokok yang dilakukan SETARA Institute di setiap akhir program riset tertentu dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik unsur pemerintah maupun

non-pemerintah. Diseminasi riset yang dilakukan menjadi daya tarik dan penguatan publikasi riset SETARA, karena turut mengundang media sebagai mitra yang berkontribusi dalam penyebarluasan hasil riset. Sehingga, berbagai riset SETARA telah membantu dan/atau berkontribusi dalam menjawab kebutuhan para peneliti-peneliti lain (perguruan tinggi, organisasi internasional, dan lembaga *think tank* lainnya). Diseminasi ini selain sebagai arena *sharing knowledge* juga menjadi instrumen penjaminan mutu melalui *feed back* dan kritik yang diberikan.

Kemudian dalam 10 tahun berikutnya, selain penguatan kualitas riset dan manajemen pengetahuan lainnya, SETARA Institute juga melakukan penguatan kapasitas internal, dalam hal ini peneliti. Kondisi kuantitas dan kualitas peneliti yang belum optimal pada menjadi catatan dari masa sebelumnya. Dengan hanya 3 orang *principle researcher*, 2 orang strata pendidikan S-2, bahkan satu di antaranya sedang menempuh program doktor, dan sisanya adalah S-1, membuat SETARA Institute memiliki keterbatasan menjawab ekspektasi publik yang membutuhkan riset-riset dan pengetahuan baru.

Bentuk penguatan kapasitas internal dalam 10 tahun berikutnya berupa penambahan peneliti dan penguatan kriteria peneliti ketika rekrutmen. Peneliti-peneliti yang direkrut SETARA memiliki fokus penelitian yang sesuai dengan fokus kajian lembaga, meliputi kebebasan beragama/berkeyakinan, *rule of law*, P/CVE, sektor keamanan, dan *business and human rights*. Masing-masing fokus kajian tersebut telah diisi oleh minimal 1 orang peneliti.

Kondisi ini membuat produktifitas dan akselerasi program kelembagaan semakin memadai, sebab tumpang tindih peran peneliti dapat diatasi. Kapasitas peneliti juga semakin kuat yang terlihat melalui jenjang pendidikan. Sejak tahun 2018, SETARA Institute mulai memiliki peneliti dengan latar pendidikan S-2 dengan berasal dari kampus-kampus terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Begitupun dengan *associate researcher* yang telah tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia dengan latar belakang akademisi dan praktisi.[]

BAB II

RISET DAN ADVOKASI

Dalam rentang 8 tahun sejak ditetapkannya rencana strategis dan fokus area riset SETARA Institute pada tahun 2017, konteks situasi dan logika publik yang dihadapi masih relatif belum berubah, bahkan semakin kompleks. SETARA Institute mendapati kecenderungan yang masih sama dengan kondisi yang menjadi dalil kehadiran perhimpunan ini. Hal ini ditandai dengan kemunduran demokrasi yang diindikasikan dengan berbagai aksi intimidatif dan banalitas penegakan hukum, disrupsi legislasi dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan; pelanggaran HAM dalam konteks pengekan kebebasan publik dan individu yang menunjukkan semakin lemahnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM oleh negara.

Kondisi ini juga tak terkecuali kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga seperti perusahaan atau entitas bisnis; praktik-praktik pengkerdilan ruang sipil yang diinjeksi melalui penempatan jabatan strategis oleh aparat keamanan negara; dan lemahnya pendekatan negara dalam penerapan pendekatan keamanan insani dalam menangani berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi.

2.1. AREA RISET DAN ADVOKASI SETARA INSTITUTE

2.1.1. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Preventing Violent Extremism

Tujuan Strategis 1:

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan

Indikator Capaian

1. Berkurangnya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan
2. Terbangunnya komunikasi *multi stakeholders* pada daerah-daerah yang menjadi area kerja lembaga
3. Meningkatnya pengetahuan sektor masyarakat tertentu yang telah ditetapkan, seperti kalangan guru, siswa, dan pemuda; dan
4. Inisiatif-inisiatif bersama komunitas dalam memperkuat toleransi dan mencegah konflik atas dasar agama dan ekstremisme.

Dalam bidang riset dan advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), SETARA Institute terus menegaskan perannya sebagai pionir dan otoritas rujukan bagi lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan publik. Sejak SETARA Institute berdiri pada 2005, lanskap KBB di Indonesia masih menghadirkan tantangan serius. Berdasarkan pemantauan tahunan SETARA Institute, pada tahun 2024 tercatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran terhadap KBB, meningkat signifikan dibanding 217 peristiwa dan 329 tindakan pada 2023, serta 175 peristiwa dan 333 tindakan pada 2022. Peningkatan ini memperlihatkan kecenderungan stagnasi bahkan regresi dalam perlindungan hak-hak beragama dan berkeyakinan.

Tren juga menunjukkan penguatan keterlibatan aktor negara baik melalui tindakan langsung (*violence by commission*) maupun pembiaran (*violence by omission*) serta meningkatnya jumlah produk hukum daerah yang diskriminatif. Kondisi ini menjadi refleksi strategis bagi SETARA Institute untuk memperkuat kesinambungan intervensi kelembagaan di tahun-tahun mendatang, agar tetap menjadi kekuatan moral dan epistemik dalam mengawal demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia di Indonesia serta berdiri teguh bersama kelompok minoritas dan marjinal.

Dalam kerja-kerja riset dan advokasi,

SETARA Institute konsisten menghadirkan dua produk pengetahuan utama yang menjadi rujukan nasional, yaitu Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang telah terbit secara berkala sejak 2006 dan menjadi catatan paling awal dan konsisten mengenai pelanggaran KBB di Indonesia, serta Indeks Kota Toleran (IKT) yang telah diterbitkan sejak 2015. Hingga tahun 2024, IKT telah memasuki edisi ke-9, dan pada 2025 akan menandai satu dekade penerbitannya sebagai hasil kajian riset dan daya dorong bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola toleransi di wilayahnya.

Sejak 2015, IKT memperoleh dukungan moral dan politik dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelumnya UKP-PIP dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan dukungan ini, IKT telah memberikan dampak signifikan bagi pemajuan toleransi di kota-kota di Indonesia. IKT telah menjadi standar pengukuran kinerja bagi daerah-daerah baik dalam RPJMD maupun dalam mengukur kinerja seorang Walikota. Dengan posisi strategis yang seperti ini, SETARA Institute terus berupaya melakukan riset dan *indexing* dan menerbitkannya dalam bentuk IKT.

SETARA Institute mencatat 11 dampak riset Indeks Kota Toleran (IKT) dalam pemajuan toleransi di kota-kota, baik dalam konteks kinerja pemerintah maupun partisipasi masyarakat sipil.

1. Penguatan fokus pemerintah kota terhadap isu toleransi dan keberagaman melalui desain perencanaan pembangunan inklusif, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahunnya.
2. Penguatan program pemerintah mengenai pemajuan toleransi melalui terobosan kebijakan maupun aktivitas dengan melibatkan publik secara luas.
3. Peningkatan alokasi anggaran terhadap isu-isu keberagaman, baik terhadap aktivitas organisasi keagamaan maupun instansi pemerintah terkait dalam isu toleransi.
4. Berkontribusi terhadap penerbitan produk hukum daerah yang kondusif terhadap tata kelola kehidupan yang toleran.
5. Akselerasi penyelesaian maupun respons pemerintah kota terhadap suatu peristiwa intoleransi dan diskriminasi.
6. Penguatan upaya pemerintah kota dalam pencegahan peristiwa intoleransi dan diskriminasi.
7. Penguatan partisipasi dan inovasi masyarakat sipil dalam pemajuan toleransi di kota-kota.
8. Terjalinnnya saling studi tiru terhadap kota-kota yang memperoleh skor tertinggi dan terendah dalam penelitian Indeks Kota Toleran
9. Penguatan inklusi sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang beragam.
10. Penguatan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi toleransi di daerah.
11. Penguatan diplomasi toleransi di dunia internasional terhadap kondisi toleransi di kota-kota, terutama pada kota-kota yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Kota Toleran.

2.1.2. Rule of Law

<p>Tujuan Strategis 2:</p> <p>Meningkatnya efektivitas mekanisme akuntabilitas negara dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM termasuk dan terutama akses masyarakat pada keadilan</p>
<p>Indikator Capaian</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan laporan pemantauan <i>up to date</i> tentang kinerja institusi HAM dan kinerja pemerintah dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM. 2. <i>Policy brief</i> yang ditujukan bagi institusi-institusi HAM dan pemerintah, yang memuat gagasan peningkatan efektivitas mekanisme akuntabilitas; dan 3. Adanya sejumlah terobosan yang ditawarkan oleh SETARA Institute untuk meningkatkan mekanisme yang efektif bagi pemajuan HAM dan akses keadilan.

Sejak tahun 2010, SETARA Institute secara periodik merilis laporan tahunan Indeks Kinerja HAM. Laporan Indeks Kinerja HAM memuat analisis SETARA Institute berdasarkan pada

kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Dengan segala kompleksitas dan komprehensivitas laporan, basis data yang menjadi temuan menjadi rujukan utama dalam memotret lanskap kinerja pemajuan HAM di tanah air.

Secara internal, laporan indeks kinerja HAM merupakan data *longitudinal* yang memberikan implikasi dalam advokasi dan pengawasan kinerja pemerintah, menjadi data komparasi atas klaim-klaim kemajuan HAM yang disampaikan pemerintah, mendorong pengembangan dan *engagement* kebijakan yang lebih ramah HAM, dan penyediaan data dalam pengembangan intervensi program strategis kelembagaan.

SETARA Institute secara aktif merespon serangkaian kebijakan, peraturan dan dinamika publik dalam kerangka *rule of law*. Kerja ini diejawantahkan dalam berbagai respon melalui siaran pers, penyusunan *policy brief*, *policy advocacy* bersama jaringan masyarakat sipil, dan menjadi *intersectional issues* dalam mendukung substansi pada advokasi isu lain, terutama KBB dalam *mainstreaming* isu pemerintahan yang inklusif (*inclusive governance*).

Dampak lanjutan di tahun 2020-2022 intervensi program SETARA Institute dalam *mainstreaming inclusive governance*, mampu memperluas *stakeholders engagement* SETARA pada pemerintah daerah untuk membangun kesadaran tentang promosi kebijakan non-diskriminatif, pengembangan inisiatif daerah yang pro-toleransi dan keberagaman, dan peluang kolaborasi bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan inklusif di masa depan.

Pada 2024 SETARA Institute mengeluarkan produk baru untuk menilai kondisi inklusi secara nasional dan daerah di 24 kota dan kabupaten di Indonesia, yaitu Indeks Inklusi Sosial Indonesia

(IISI) yang merupakan studi pertama yang dilakukan secara khusus untuk mengukur kondisi kinerja atau proses dan capaian agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia. IISI bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sebagai pedoman intervensi bagi kerja-kerja masyarakat sipil dalam menguatkan inklusi sosial di masyarakat.

SETARA Institute juga aktif dalam mendorong reformasi kebijakan publik bersama jaringan masyarakat sipil. SETARA menjadi bagian penting dalam kontribusi substansi terhadap advokasi yang dilakukan oleh “Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Hukum” dengan fokus pada *Judicial Review UU P3*, dan “Koalisi Masyarakat Penyelamat Kemerdekaan Peradilan” dalam mengawal independensi Mahkamah Konstitusi yang akhir-akhir ini mengalami berbagai intervensi untuk menggoyahkan peran sebagai lembaga negara pengawal konstitusi.

2.1.3. Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Manusia

Saat ini SETARA Institute termasuk menjadi salah satu pemain kunci pada wadah masyarakat sipil dengan *concern* pada isu Reformasi Sektor Keamanan (RSK), dengan terlibat aktif dalam membangun diskursus publik, serta kajian riset yang menjadi referensi bagi lembaga terkait. Pelibatan SETARA, lebih banyak berkonsentrasi pada penyusunan substansi dan ide tentang arah reformasi sektor keamanan. SETARA dilibatkan dalam proses *judicial review* atas UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN), yang diindikasikan sebagai upaya memasukkan doktrin militerisme pada kelompok sipil.

SETARA secara gradual menyusun laporan tematik terkait dengan Laporan Hari Ulang

Tahun TNI yang difokuskan untuk mengukur capaian dan konsistensi advokasi atas mandat reformasi TNI. Pada konteks yang sama, SETARA juga menginisiasi dan mengawal implementasi reformasi Polri yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Inisiatif Reformasi Polri atau *Police Reform Initiative (PRI)* menjadi bukti konsistensi SETARA Institute untuk memastikan ketersediaan pengetahuan dan alternatif kebijakan dalam reformasi Polri.

Area riset RSK menjadi konsen dan rujukan media massa, atas pandangan dan masukan terhadap berbagai isu relevan yang berkembang. SETARA memandang bahwa pemenuhan mandat reformasi TNI dan Polri masih jauh dari capaian untuk pemolisian demokrasi dan ramah HAM. Selain itu, paradigma dan konsep *Human Security* dalam area riset dan advokasi SETARA, masih memerlukan upaya penguatan di sisi internal. Belum tereksporasinya paradigma *human security* menjadi peluang baik bagi SETARA ke depan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang terjadi dalam rentang tahun 2017-2022, dengan harapan dapat ditemukan formulasi utuh baik secara konsepsi maupun praksis pada isu *human security*.

Sejak tahun 2022, SETARA Institute secara khusus memusatkan perhatian pada kajian riset yang menelaah dan mendiagnosis akar permasalahan struktural, kultural, dan operasional

di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, yang selama ini kerap memunculkan keberulangan kasus dan krisis kepercayaan publik. Melalui wadah *Police Reform Initiative (PRI)*, selama dua tahun penelitian intensif dilakukan dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil, anggota Polri, dan masyarakat sipil. Pada tahun 2024, SETARA Institute menerbitkan kajian riset strategis berjudul “Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Visi Indonesia 2045”, yang memuat peta jalan transformasi kelembagaan kepolisian secara komprehensif dan aplikatif. Dokumen ini kini semakin relevan menjadi acuan dan referensi penting bagi Polri, dalam meramu Reformasi Polri yang berorientasi pada demokratisasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan wadah *Police Reform Initiative*, SETARA melakukan diskusi dengan pakar dari BRIN, akademisi, serta berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap reformasi Polri untuk memperkuat arah transformasi kelembagaan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui forum tersebut, SETARA berupaya mendorong pembahasan yang berbasis riset dan bukti empiris mengenai tata kelola keamanan, relasi sipil-militer, serta desain kelembagaan Polri yang lebih adaptif terhadap prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat sipil di era modern.

2.1.4. Bisnis dan HAM

<p>Tujuan Strategis 3:</p> <p>Tersedianya perangkat-perangkat advokasi dan perlindungan hak warga negara dari potensi pelanggaran HAM pada sektor ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM.</p>
<p>Indikator Capaian</p>
<p>1. <i>Baseline study</i> regulasi dan praktik bisnis dalam pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, pada sektor properti, industri kesehatan, dan industri ekstraktif.</p>

2. *Policy tools*/regulasi yang kondusif bagi penguatan adopsi prinsip bisnis dan HAM pada sektor properti, industri kesehatan, dan industri ekstraktif; dan
3. Adanya *corporate engagement* dalam promosi prinsip bisnis dan HAM.

Sejak tahun 2015, area riset *Bisnis dan HAM* di SETARA Institute yang pada awalnya berfokus pada penguatan kapasitas internal dan pengembangan kerangka konseptual, kini berkembang pesat menjadi salah satu pilar penting riset dan advokasi kelembagaan. Jika pada tahap awal posisi SETARA dalam diskursus isu ini belum menjadi rujukan utama, dalam beberapa tahun terakhir perannya semakin menonjol, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam *Gugus Tugas Uji Tuntas HAM* di Kementerian Hukum dan HAM, kemitraan riset strategis dengan Universitas Haluoleo, serta berbagai inisiatif riset dan advokasi yang mendorong tata kelola bisnis yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

SETARA memandang isu bisnis dan HAM sebagai bidang yang memerlukan intervensi dan pendekatan lebih intensif, terutama dengan menguatnya diskursus mengenai keberlanjutan (*sustainability*) dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta pentingnya perlindungan, penghormatan, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM oleh korporasi.

Dalam rentang 2017–2025, SETARA Institute telah berkontribusi melalui berbagai program strategis, seperti memberikan rekomendasi remediasi bagi korban kebakaran lahan kepada empat perusahaan (2017), membantu penyusunan *Human Rights Policy Commitments* bagi perusahaan pertambangan di Aceh dan Sumatera Utara (2019), serta mendampingi koperasi petani kelapa sawit di Riau dalam memperjuangkan pemulihan hak atas pelanggaran HAM oleh perusahaan BUMN (2020–2022). Pada September 2023, SETARA merilis laporan komprehensif bertajuk *Normative Innovation for the Advancement of Business and*

Human Rights in Indonesia, yang memetakan kewajiban negara, tanggung jawab korporasi, akses terhadap pemulihan, serta praktik *human rights due diligence* pada 10 perusahaan dengan nilai aset terbesar di Indonesia.

Pada Oktober–November 2023, SETARA bekerja sama dengan *Sustainable-Inclusive Government Initiatives* (SIGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dalam peningkatan kapasitas pegawai BPOM mengenai penerapan prinsip *Business and Human Rights* di sektor pengawasan obat dan makanan, serta menjadi instruktur pelatihan uji tuntas HAM, penelusuran rantai nilai, mekanisme pemulihan yang efektif, dan integrasi *Human Rights Due Diligence* dalam laporan keberlanjutan. Pada tahun yang sama, SETARA juga ditetapkan sebagai anggota *National Taskforce on Business and Human Rights*.

Memasuki periode 2024–2025, SETARA aktif mendukung pelaksanaan *National Strategy on Business and Human Rights Sesuai Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023*. SETARA menerbitkan beberapa publikasi penting, antara lain laporan panduan kebijakan berjudul *Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EU CSDDD* (Oktober 2024) dan *Business and Human Rights Outlook 2025: 10 Isu Prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia* (Februari 2025). Selain itu, SETARA juga dipercaya sebagai *in-house trainer* pelatihan *Human Rights Due Diligence* bagi serikat pekerja yang diselenggarakan CNV Internationaal, serta ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai tim ahli dalam penyusunan Peraturan Presiden baru mengenai pedoman pelaksanaan *Human Rights Due Diligence* oleh korporasi (Maret 2025 – sekarang).

2.2. CAPAIAN STRATEGIS

Sejak berdiri pada tahun 2005 di era pasca-reformasi, SETARA Institute hadir dengan mandat utama untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, pluralisme, demokrasi, serta kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Mandat ini diwujudkan melalui kajian riset, advokasi kebijakan, pendidikan publik, serta fasilitasi dialog atas isu-isu faktual yang relevan dengan konteks demokrasi Indonesia, sekaligus mengonsolidasikan penguatan ruang sipil dan mendorong resolusi konflik. Kerja-kerja ini dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil, lembaga negara di tingkat nasional maupun daerah, serta melalui serangkaian pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan pluralisme dan toleransi.

SETARA Institute terus menunjukkan kecakapannya sebagai lembaga riset dan advokasi dengan menjadi pionir dalam kajian KBB dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (P/CVE), yang kini diakui sebagai rujukan penting dalam penguatan kebijakan nasional. Seiring dengan itu, SETARA juga memperluas mandatnya dengan menjadi *leading* di bidang reformasi sektor keamanan dan keamanan manusia, *rule of law*, serta bisnis dan HAM, menjadikannya salah satu *think tank* independen yang mampu mengintegrasikan isu HAM dengan demokrasi, keamanan manusia, dan pembangunan yang inklusif.

2.2.1. Produk Pengetahuan Strategis

Selama dua dekade perjalanannya, SETARA Institute telah berkembang menjadi *think tank* dan lembaga advokasi yang konsisten melahirkan berbagai gagasan kritis sekaligus konstruktif untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui riset, *policy paper*, buku, hingga berbagai indeks, SETARA membangun tradisi produksi pengetahuan strategis yang berakar

pada data dan analisis, serta diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan publik secara nyata.

Produk-produk pengetahuan tersebut mencakup lima pilar strategis: kebebasan beragama/berkeyakinan, hukum dan konstitusi, pencegahan ekstremisme kekerasan, reformasi sektor keamanan dan keamanan manusia, serta bisnis dan HAM. Selama dua dekade, karya-karya ini tidak hanya mendokumentasikan kondisi HAM dan demokrasi di Indonesia, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan komunitas internasional dalam memperkuat agenda demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari sisi produksi pengetahuan, SETARA secara konsisten menerbitkan publikasi, termasuk Laporan Tahunan KBB, Indeks Kota Toleran, Indeks Kinerja HAM, dan Indeks Inklusi Sosial Indonesia, yang kini menjadi rujukan strategis dalam kerja-kerja advokasi di tingkat nasional maupun internasional. Riset dan advokasi SETARA juga telah memberi pengaruh signifikan dalam proses perumusan kebijakan, terutama pada lembaga-lembaga negara seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta berbagai pemerintah daerah.

Hingga tahun 2024, SETARA Institute telah menghasilkan lebih dari 555 publikasi riset dan advokasi, yang meliputi 138 buku dan laporan, 10 modul pelatihan, 255 siaran pers, serta 182 artikel opini. Angka-angka tersebut terus bertambah hingga kini.



JENIS PRODUK



35
REGULAR¹

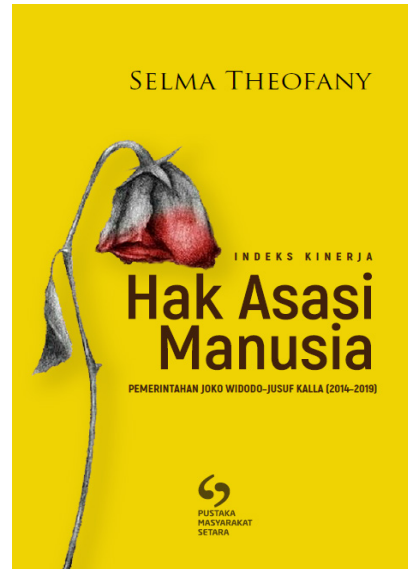


520
TEMATIK

Berdasarkan bidang kerja strategisnya, publikasi tersebut mencakup 329 karya di area kebebasan beragama, toleransi, pluralisme, dan kebhinekaan; 121 di bidang reformasi sektor keamanan; 83 terkait *rule of law*; dan 22 di bidang bisnis dan HAM. Jumlah tersebut terus bertambah hingga 2025 ini. Dari seluruh produksi pengetahuan tersebut, SETARA Institute secara konsisten menerbitkan publikasi reguler yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan kebijakan dan pemajuan toleransi di Indonesia, di antaranya yaitu:

2.2.2. Indeks dan Laporan Berkala

A. INDEKS KINERJA HAM (2010-SEKARANG)



Indeks Hak Asasi Manusia: Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Sebagai riset tahunan yang dirilis sejak tahun 2010, Indeks HAM dilakukan dengan mencatat kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM pada tiap tahunnya. Selain dimaksudkan untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas kinerja pemerintah serta menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia, publikasi Indeks HAM juga menjadi bagian dari peringatan Hari HAM Internasional setiap 10 Desember pada tiap tahunnya.

B. LAPORAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN (2007–SEKARANG)



Laporan *Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan* (KBB) merupakan publikasi tahunan yang memantau dan menganalisis pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Laporan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2007, menandai dimulainya pemantauan sistematis atas intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama maupun keyakinan di berbagai daerah. Melalui

ASI
APUT
AN

a/Berkeyakinan

ran
ransi
un
K

MA/BERKEYAKINAN

PENULIS: HALILI
EDITOR: BONAR TIGOR, NAPOSOS

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DI INDONESIA 2015

POLITIK HARAPAN MINIM PEMBUKTIAN



MERHAMAD HAFIZ
ISMAL HASANI



KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENGUTAMAAN STABILITAS POLITIK-KEAMANAN DI TAHUN POLITIK

KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DI INDONESIA TAHUN 2019



PENULIS: HALILI
EDITOR: SUDARTO

SUPREMASI INTOLERANSI

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DAN MINORITAS KEADAMAAN DI INDONESIA TAHUN 2016



Kidung Asmara Sigit
Ismail Hasani

Intoleransi Semasa Pandemi

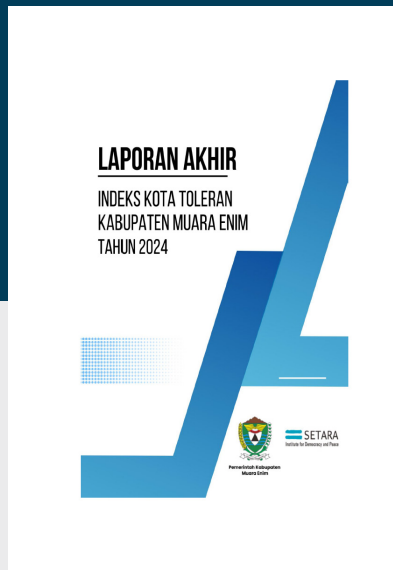
KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN
DI INDONESIA TAHUN 2020



Selama hampir dua dekade, laporan KBB memberikan dampak signifikan dalam memperkuat advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Data dan analisis yang disajikan menjadi rujukan utama bagi media, akademisi, lembaga negara, dan masyarakat sipil dalam memahami tren intoleransi serta kegagalan negara dalam perlindungan hak kebebasan beragama. Laporan ini juga menekan pemerintah agar meninjau ulang berbagai regulasi diskriminatif, memperkuat mekanisme perlindungan, serta menegakkan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Dengan demikian, laporan KBB tidak hanya berperan sebagai catatan tahunan kondisi kebebasan beragama, tetapi juga sebagai *policy driver* dan alarm moral bagi negara dalam menjaga komitmen terhadap pluralisme dan hak asasi manusia.

dokumentasi peristiwa, aktor, dan pola pelanggaran yang terjadi, laporan KBB berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengukur sejauh mana negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi.

C. INDEKS KOTA TOLERAN (2015–SEKARANG)



Indeks Kota Toleran: Indeks Kota Toleran (IKT) adalah **studi pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dengan memotret praktik dan promosi toleransi di 94 kota** di Indonesia. Sebagai riset tahunan, IKT pertama kali dipublikasikan pada tahun 2015 dan diharapkan dapat mendorong setiap kota untuk

membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

Selain itu, sejak tahun 2022 hingga kini, SETARA Institute juga bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam pengukuran kondisi toleransi di Kabupaten Muara Enim. Laporan ini disusun dengan mengutamakan praktik-praktik toleransi terbaik di Kabupaten Muara Enim. Pengukuran ini menjadi yang pertama dilakukan terhadap Kabupaten di Indonesia, sebab selama ini pengukuran toleransi dilakukan di kota-kota.



D. INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (2024–SEKARANG)

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) merupakan salah satu inovasi yang dilakukan SETARA Institute sebagai studi pertama yang secara khusus **mengukur kondisi kinerja atau proses dan capaian agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia**. IISI bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta sebagai pedoman intervensi bagi pekerja masyarakat sipil dalam menguatkan inklusi sosial di masyarakat.

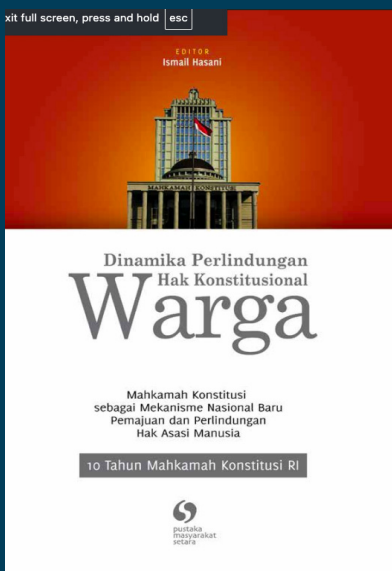
2.2.3. Riset Tematik

A. RISET TENTANG KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



Dalam riset tentang Mahkamah Konstitusi, SETARA Institute telah menerbitkan **Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi RI 2016-2017: Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter (2017)**. Laporan ini mengevaluasi kualitas putusan MK dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, dengan periode kajian 18 Agustus 2016 hingga 16 Agustus 2017. Fokus pada aspek-aspek seperti manajemen peradilan konstitusi, waktu perkara, dosis regulasi baru (norma baru) yang dihasilkan oleh putusan, serta tantangan seperti inkonsistensi, praktik *ultra petita* dan *ultra vires*, serta kasus integritas hakim, khususnya Patrialis Akbar.

Laporan juga menyajikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kredibilitas dan karakter MK, termasuk penguatan sistem pengawasan eksternal, prosedur seleksi hakim yang transparan, dan mekanisme untuk memastikan putusan-putusan MK tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berwibawa, konsisten, dan berorientasi pada pemajuan hak konstitusional.



Selain itu, SETARA juga telah menerbitkan riset berjudul **Indeks Hak Konstitusional Warga: 10 tahun Mahkamah Konstitusi & amandemen UUD**. Laporan *Indeks Hak Konstitusional Warga: 10 Tahun Mahkamah Konstitusi & Amandemen UUD* yang dirilis oleh SETARA Institute pada tahun 2013 merupakan kajian evaluatif terhadap peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sejak berdirinya lembaga tersebut pasca-amandemen UUD 1945.

Melalui laporan ini, SETARA menyusun sebuah indeks untuk menilai sejauh mana MK menjalankan mandat konstitusionalnya dalam menjaga supremasi konstitusi, menegakkan keadilan konstitusional, dan memastikan setiap warga negara memperoleh

perlindungan hukum yang setara. Kajian ini tidak hanya memotret capaian kelembagaan MK dalam satu dekade pertama, tetapi juga menggarisbawahi tantangan terhadap akuntabilitas, integritas, dan efektivitas putusan MK dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Inisiatif terbaru SETARA Institute dalam riset ini berupa assessment putusan Mahkamah

Konstitusi. Laporan pertama yang disusun SETARA berjudul *Constitutional Decision Impact Assessment* (CIDIA).

Constitutional Decision Impact Assessment (CiDIA) merupakan sebuah brief dari studi kasus putusan pengujian konstitusional dengan berfokus pada dampak putusan tersebut terhadap kebijakan sektoral dan perlindungan HAM.

B. BISNIS DAN HAM

CIDIA
Constitutional Decision Impact Assessment
Bridging Constitutional Compliance

SETARA
Institute for Democracy and Peace

ANTARA PRIORITAS DAN KESINAMBUNGAN

Pendidikan Gratis Tingkat SD-SMP dan Implementasi Pembinaan Pendidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-X/2009/2024 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SETARA Institute, 2025

A. PENDAHULUAN

Pada 27 Mei 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabdikan Putusan No. 3/PUU-X/2024 atas pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan MK ini mengamanatkan untuk adanya biaya yang dipungut pada jenjang pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, sebagai pelaksanaan wajib belajar untuk warga negara yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas. Putusan ini menjadi langkah progresif baru dari MK untuk memperpendek pemenuhan hak setiap warga atas pendidikan, namun penting juga untuk direpon lebih lanjut pada tahap pelaksanaan kebijakannya.

Meiki bisa dibayangkan sebagai sangat wajar karena MK memperjelas jaminan konstitusional bagi seluruh warga negara untuk tanggapan pendidikan, namun ketegangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muji, memberikan sinyal untuk jalan lebih lanjut, sebab perlunya pertimbangan pembatasan pendidikan menggunakan APBN dan ketanggapan (availability) pelaksanaan tersebut. Ketanggapan tersebut juga nantinya akan berpengaruh pada bagaimana penanganannya.

TIM PENYUSUN
PENYUSUN
Azem Marhandia Anand
Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute

EDITOR
Sayidatul Inayah
Peneliti Rule of Law SETARA Institute

Jl. Hang Lekuit II No. 41
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12120 - Indonesia
Telp.: (+621) 7208500
Fax.: (+621) 2273583
Hotline: +628133025113
Email: setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
Website: www.setara-institute.org

<https://www.setara-institute.org/putusan-mk-3-2025-05-27>
pdk-2025-05-27-162295

SETARA
Institute for Democracy and Peace

SIGI RESEARCH & CONSULTING
SUSTAINABLE INCLUSIVE GROWTH AND INNOVATION

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2025

10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM Di Indonesia

EDITOR
Nabhan Anqani

TIM PENYUSUN
Ismail Hasan
Halilul Hasan
Sayidatul Inayah
Nabhan Anqani

PISTAKA MASYARAKAT SETARA

Pada bidang HAM, konsistensi SETARA Institute dalam mendorong pengarusutamaan akuntabilitas HAM dan kebijakan berbasis HAM akan tetap menjadi bagian dari area riset SETARA Institute. Seiring dengan orientasi kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan industri, advokasi sektor pembangunan, bisnis, dan HAM juga menjadi kebutuhan aktual yang perlu dijawab oleh disiplin hak asasi manusia. Banyak organisasi telah bekerja pada isu lingkungan, *landscape*, dan ketahanan. Tetapi ruang pengembangan isu ini masih membutuhkan partisipasi luas elemen masyarakat sipil.

PEREKASIS
ISHAIL HASANI
NABHAN AIQANI

EDITOR
HALILUL HASANI

INOVASI NORMATIF

PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

PISTAKA MASYARAKAT SETARA

SETARA
Institute for Democracy and Peace

SIGI RESEARCH & CONSULTING
SUSTAINABLE INCLUSIVE GROWTH AND INNOVATION

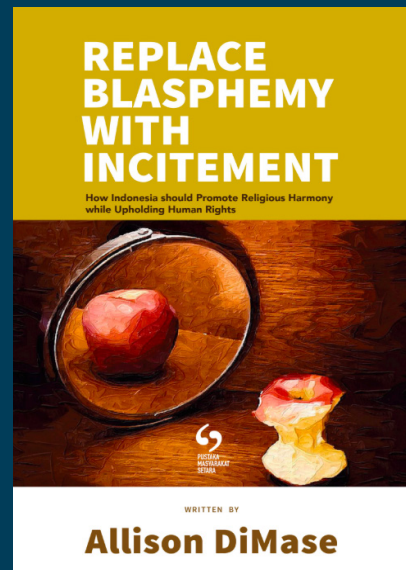
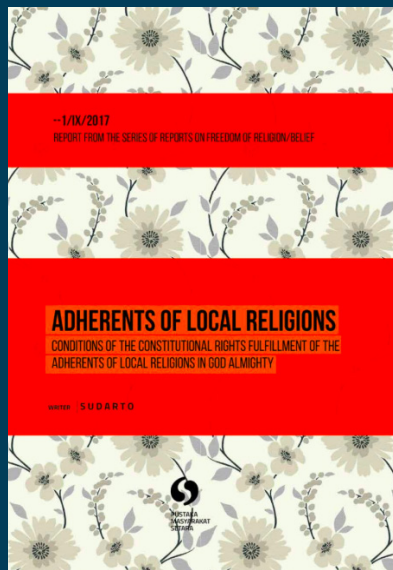
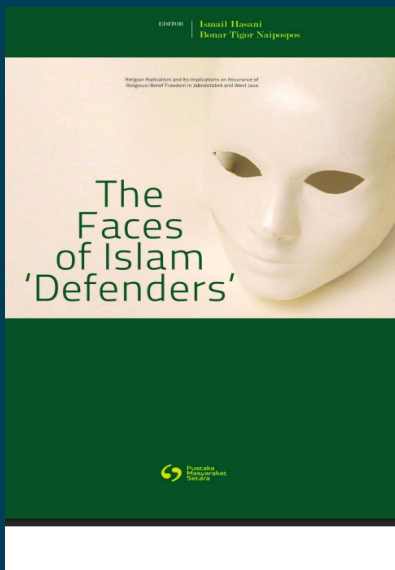
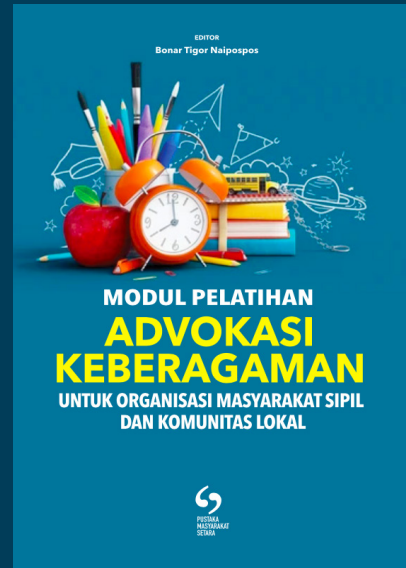
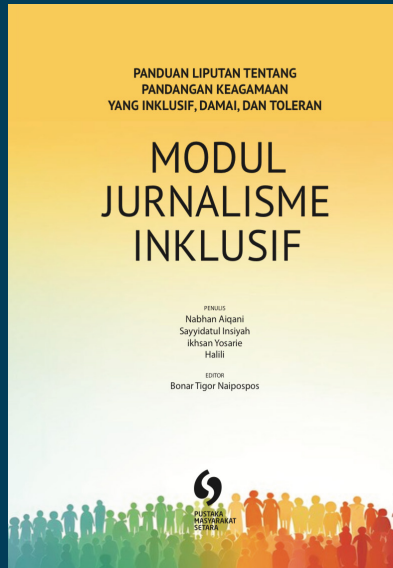
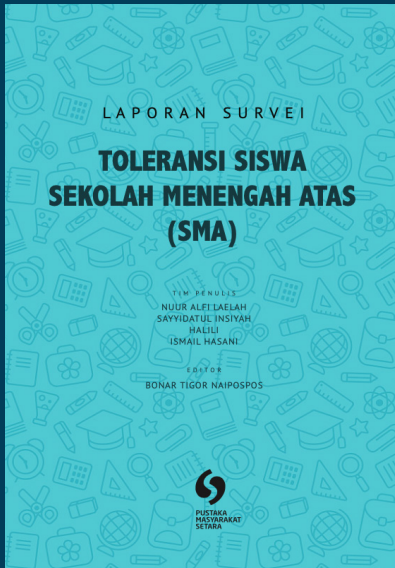
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS POLICY

DAMPAK DAN RESPONS INDONESIA ATAS ADOPTI EUCSDDD

PISTAKA MASYARAKAT SETARA

SETARA Institute memperkuat sektor riset dan advokasi kebijakan berbasis pada perspektif bisnis dan HAM. Beberapa publikasi yang telah dilakukan seperti studi atas *Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia* (2023), *Business and Human Rights Policy: Dampak dan Respon Indonesia atas Adopsi EUCSDDD (2024)*, *Outlook Bisnis dan HAM 2025: 10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM di Indonesia*, dan Ringkasan laporan penelitian capaian kinerja dan status terkini pemajuan bisnis dan HAM di Indonesia. SETARA Institute memandang bahwa area ini sebagai salah satu area strategis yang perlu dikembangkan.

C. PEMAJUAN TOLERANSI, DEMOKRASI, DAN INKLUSI SOSIAL



Selain riset-riset yang bersifat tahunan, SETARA Institute juga memiliki berbagai riset-riset strategis pada topik toleransi dan inklusi sosial. Melalui riset-riset tersebut, SETARA Institute berperan sebagai penghasil bukti (*evidence*) yang kritis dan independen untuk memahami dinamika toleransi dan inklusi sosial di Indonesia. Pendekatan risetnya menggabungkan analisis kebijakan, pemetaan praktik intoleransi, studi kasus komunitas, dan survei opini publik—semua diarahkan untuk menjelaskan akar masalah sekaligus peluang intervensi.

Sejumlah riset strategis yang dilakukan SETARA pada isu ini misalnya berupa Survei Persepsi Mahasiswa mengenai Pancasila. Survei tersebut dilakukan di 5 (lima) kota besar di Indonesia dan menghasilkan temuan yang menjadi salah satu referensi utama dan terbaru bagi pemangku kebijakan di sektor pendidikan dan lembaga negara terkait untuk melakukan pembinaan lebih serius terhadap mahasiswa agar toleransi tetap mengakar di tubuh mahasiswa.

Riset lainnya berkenaan dengan penguatan kapasitas aktor masyarakat sipil melalui penyusunan modul. Sebab dalam konteks sosial-politik Indonesia yang terus berhadapan dengan dinamika intoleransi, eksklusi, dan polarisasi identitas, SETARA Institute juga menyadari bahwa masyarakat sipil perlu mengambil peran lebih besar dalam pemajuan toleransi. Peran tersebut bukan hanya oleh masyarakat sipil di Jakarta, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, keberadaan modul keberagaman bagi masyarakat sipil menjadi kebutuhan strategis. SETARA Institute menyusun modul ini bukan sekadar alat pelatihan, tetapi juga

instrumen pembelajaran sosial untuk membangun kesadaran kritis, empati lintas identitas, dan kapasitas advokasi berbasis nilai-nilai kebhinekaan.

Penguatan pemajuan toleransi dan inklusi sosial juga dilakukan melalui jurnalisme. SETARA Institute menyadari bahwa jurnalisme inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun ruang publik yang adil, empatik, dan representatif. Jurnalisme inklusif mengedepankan prinsip kesetaraan dalam pemberitaan dengan memberikan ruang bagi suara yang terpinggirkan, baik berdasarkan agama, etnis, gender, orientasi seksual, disabilitas, maupun status sosial-ekonomi. Urgensi jurnalisme inklusif terletak pada kemampuannya untuk menantang bias struktural dan kultural yang sering kali mendominasi pemberitaan—bias yang dapat menyingkirkan kelompok minoritas, memperkuat stereotip, atau bahkan menormalisasi intoleransi.

Berbagai riset maupun modul pelatihan yang SETARA susun memiliki dampak kebermanfaatannya yang terlihat pada beberapa ranah: peningkatan pemahaman publik dan pembuat kebijakan tentang mekanisme diskriminasi; penguatan kapasitas organisasi lokal melalui rekomendasi dan modul advokasi berbasis bukti; terciptanya dasar hukum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak minoritas; serta kontribusi terhadap pencegahan konflik melalui program intervensi berbasis komunitas. Selain itu, risetnya menyediakan alat ukur—indikator dan metodologi—yang membantu memonitor perkembangan toleransi secara berkala sehingga intervensi dapat dievaluasi dan disesuaikan.

D. REFORMASI SEKTOR KEAMANAN



Dalam dua dekade perjalanan demokrasi Indonesia, SETARA Institute semakin kokoh menempatkan sektor keamanan sebagai salah satu fokus strategis riset dan advokasinya. Bagi SETARA, reformasi sektor keamanan bukan semata agenda institusional, tetapi bagian integral dari konsolidasi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Hasil riset-riset tersebut memberikan kontribusi strategis bagi upaya pembenahan kebijakan dan kelembagaan. SETARA mendorong paradigma keamanan yang berorientasi pada *human security*, di mana keamanan warga menjadi pusat orientasi, bukan sekadar keamanan negara.

Secara strategis, riset SETARA tentang TNI menyoroti isu-isu seperti peran militer dalam politik sipil, keterlibatan dalam urusan non-pertahanan, serta implikasi HAM dari pendekatan keamanan yang masih bercorak koersif. Laporan Reformasi TNI menegaskan bahwa proses demokratisasi sektor pertahanan harus berjalan seiring dengan pemajuan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Reformasi yang sejati menuntut militer yang profesional, fokus pada pertahanan eksternal, serta bebas dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi.



Sementara pada Polri, riset-risetnya mengkaji problematika budaya kekuasaan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, tata kelola sumber daya manusia, hingga kebutuhan pembenahan mekanisme pengawasan eksternal. Kedua bidang riset ini berangkat dari kesadaran bahwa tanpa reformasi keamanan yang demokratis, hak-hak warga negara tetap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Melalui analisis kebijakan, studi kasus, dan rekomendasi berbasis data, riset SETARA memperkaya wacana publik tentang pentingnya kontrol sipil atas aparat keamanan, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap praktik keamanan.

SETARA Institute juga menyusun riset tentang Desain Transformasi Polri yang merupakan bagian dari komitmen SETARA

Institute untuk mendorong tata kelola sektor keamanan, khususnya Polri, yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Sebab, meski demokrasi Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade, reformasi kepolisian masih menghadapi tantangan mendasar: problem budaya kekuasaan, lemahnya pengawasan, serta ketimpangan antara mandat perlindungan warga dengan praktik operasional di lapangan.

Melalui riset ini, SETARA Institute berupaya merumuskan kerangka transformasi kelembagaan Polri yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga paradigmatik. Transformasi yang dimaksud menuntut perubahan dalam cara pandang, tata nilai, dan orientasi kelembagaan—dari aparat penegak hukum yang berpusat pada kekuasaan, menuju institusi pelayanan publik yang berlandaskan etika, profesionalisme, dan akuntabilitas sosial.

E. PENCEGAHAN EKSTREMISME KEKERASAN (P/CVE)



Riset Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (P/CVE) yang dilakukan oleh SETARA Institute berangkat dari keyakinan bahwa ekstremisme tidak dapat diatasi semata dengan pendekatan keamanan, tetapi harus ditangani melalui strategi yang berakar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penguatan kohesi sosial. Melalui riset P/CVE ini, SETARA Institute memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai aktor kunci dalam membangun demokrasi yang resilien terhadap kekerasan berbasis ideologi.

Selain laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang menjadi *baseline* dalam memahami kondisi intoleransi, yang notabene dalam tesis SETARA bahwa intoleransi merupakan anak tangga pertama menuju terorisme, SETARA juga melakukan studi kebijakan guna mengakselerasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAD P/CVE) di tingkat daerah.

Riset ini lahir dari kesadaran bahwa upaya pencegahan ekstremisme tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan nasional, melainkan harus terinstitusionalisasi hingga ke level pemerintahan daerah—tempat di mana kerentanan sosial, ideologis, dan ekonomi paling nyata dirasakan. Secara strategis, riset ini berupaya menilai **kesiapan, kapasitas, dan komitmen pemerintah daerah** dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengawal RAD P/

CVE secara efektif. Dengan memadukan analisis kebijakan, studi lapangan, dan dialog multi-pihak, riset ini menyoroti faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan akselerasi RAD: mulai dari dukungan politik kepala daerah, koordinasi antar-instansi, hingga pelibatan masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan kelompok pemuda dalam desain maupun pelaksanaan program.

2.2.4. Pengaruh Riset dan Advokasi SETARA terhadap Kebijakan Publik

Sebagai lembaga riset dan advokasi yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman, **SETARA Institute** menempatkan pengetahuan sebagai basis utama dalam mempengaruhi arah kebijakan publik. Dalam kerangka akademik, fungsi riset dan advokasi SETARA bekerja secara sinergis untuk menciptakan *evidence-based policy*—yakni ketika data empiris, analisis kritis, dan pengalaman lapangan digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan akuntabel.

SETARA Institute mengombinasikan riset dan advokasi sebagai model *policy-oriented research*, yakni ketika pengetahuan tidak berhenti pada produksi ilmiah, melainkan bertransformasi menjadi *social and policy impact*. SETARA berhasil menempatkan diri sebagai *epistemic community* yang konsisten dalam membangun tata kelola kebijakan publik berbasis nilai-nilai HAM, keadilan sosial, dan inklusi. Dalam hampir dua dekade sejak didirikan, kerja-kerja SETARA Institute telah berkontribusi terhadap penguatan pada level pemerintah, masyarakat, dan kelompok rentan, di antaranya meliputi:

Level Pemerintah

- 1) SETARA Institute berkontribusi dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah.
- 2) Hasil riset, hasil advokasi, rekomendasi kebijakan, maupun produk-produk pengetahuan lain yang diproduksi oleh SETARA Institute telah menjadi **referensi berbagai kementerian/lembaga negara dalam penyusunan kebijakan terkait**

toleransi, kebhinekaan, dan inklusi, diantaranya oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan BNPT, dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan toleransi, kebhinekaan, dan ideologi negara.

- 3) Pelibatan strategis yang dilakukan SETARA Institute terhadap berbagai kementerian/lembaga **mendorong inisiasi berbagai program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah** untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai HAM.
- 4) Kerja-kerja advokasi SETARA Institute telah **mendorong sejumlah pemerintah daerah untuk bergegas melakukan upaya promosi toleransi dan inklusi**, baik dalam bentuk pembentukan regulasi maupun program-program yang promotif terhadap penguatan toleransi di daerah.
- 5) Tidak hanya di tingkat kota, **praktik-praktik baik yang dipromosikan melalui Indeks Kota Toleransi juga telah direplikasi oleh sejumlah kabupaten**, menunjukkan perluasan dampak positif terhadap upaya penguatan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.
- 6) Melalui **Studi Desain Transformasi Polri** yang dimulai pada 2022 dan resmi diluncurkan pada Oktober 2024, SETARA Institute tampil sebagai aktor kunci dalam mendorong agenda reformasi kepolisian di Indonesia yang semakin relevan di tahun 2025, kajian riset SETARA menjadi acuan bagi Polri maupun lembaga lainnya sebagai naskah akademik yang teruji.

Level Masyarakat

- 1) SETARA Institute berperan aktif dalam **membangun dan memelihara kolaborasi lintas sektor** melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha— dalam memperkuat *rule of law*, ekosistem toleransi, reformasi sektor keamanan, dan praktik-praktik inklusif bisnis.
- 2) Karya-karya riset dan publikasi SETARA Institute telah menjadi barometer bagi lembaga internasional, pemerintah pusat dan daerah, serta institusi lainnya **dalam mengukur dan memahami tingkat toleransi di masyarakat**.
- 3) Advokasi SETARA Institute berkontribusi terhadap akselerasi penyelesaian kasus
- 4) Melalui publikasi dan advokasi, SETARA Institute **mendorong perluasan diskursus**

publik serta memobilisasi gerakan sosial yang mendukung nilai-nilai kesetaraan pada isu-isu supremasi hukum, toleransi, reformasi sektor keamanan, maupun inklusif bisnis.

- 5) SETARA Institute turut **mendorong terbentuknya komunitas dan inisiatif di kalangan pelaku usaha untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan toleransi, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis**.
- 6) **Kemudian, dalam konteks *Marginalized Group Level***: SETARA Institute berkontribusi terhadap aspek eksternal dan internal kelompok marjinal. Dalam aspek eksternal, kerja-kerja SETARA Institute telah mendorong adanya peningkatan rekognisi negara maupun masyarakat terhadap eksistensi kelompok rentan.

2.2.5. Jejaring Nasional dan Internasional

Melalui kerja riset dan advokasinya yang konsisten, **SETARA Institute** telah menempatkan diri sebagai salah satu aktor masyarakat sipil paling berpengaruh dalam membangun ekosistem demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Riset-riset SETARA telah menjadi rujukan penting bagi berbagai lembaga nasional dan internasional.

Melalui kerja-kerja demikian, SETARA Institute telah membangun jejaring kerja sama yang luas di tingkat nasional maupun internasional, menjadikannya mitra terpercaya bagi berbagai mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan.

JUMLAH AKTIVITAS
BERSAMA PEMERINTAH³

120

JUMLAH DONOR YANG PERNAH MENDUKUNG
SETARA INSTITUTE

11

SETARA telah menunjukkan bahwa kekuatan pengetahuan yang independen dapat menjadi jembatan antara lokalitas dan universalitas dalam memperjuangkan peradaban yang lebih setara. Keberhasilan ini menunjukkan kapasitas kelembagaan SETARA dalam mengelola kepercayaan dan kemitraan strategis untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang inklusif di Indonesia. Dukungan dari berbagai mitra pembangunan internasional terhadap riset-riset SETARA datang dari berbagai negara, sebut saja dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Australia, hingga berbagai lembaga *think tank* internasional lainnya.

Salah satu kekuatan utama **SETARA Institute** yang menarik perhatian berbagai donor dan lembaga internasional adalah kredibilitasnya sebagai lembaga riset dan advokasi yang mampu memproduksi pengetahuan kritis tentang kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Donor dan lembaga internasional memandang SETARA bukan semata sebagai pelaksana program, tetapi sebagai *knowledge partner*—mitra pengetahuan yang memahami secara mendalam dinamika sosial-politik Indonesia, serta mampu menafsirkan tren global dalam kerangka lokal.

Kepercayaan tersebut dibangun atas reputasi panjang SETARA dalam menjaga independensi intelektual dan konsistensi nilai. Laporan-laporan dan risetnya tidak hanya digunakan oleh lembaga negara dan masyarakat sipil, tetapi juga menjadi rujukan bagi lembaga internasional dalam memahami arah demokrasi di Indonesia. Dengan riset yang tajam dan advokasi yang argumentatif, SETARA membantu mitra pembangunan menavigasi tantangan demokrasi di negara berkembang, sekaligus menunjukkan bahwa pembelaan terhadap HAM dan inklusi sosial

adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun tantangan keberlanjutan pendanaan masih menjadi perhatian, komitmen dan kredibilitas SETARA dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas telah memperkuat posisinya sebagai lembaga independen yang mampu berkolaborasi lintas sektor dan lintas negara demi tercapainya masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

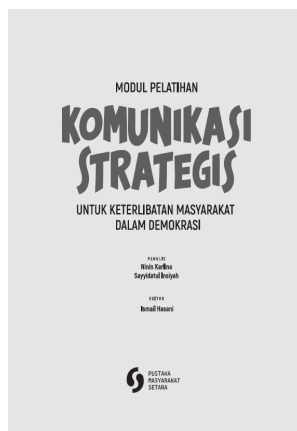
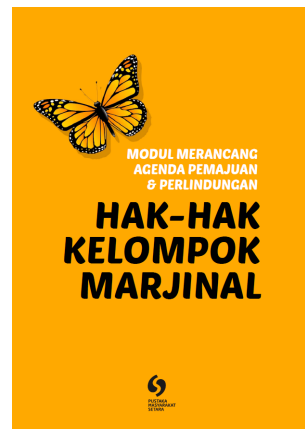
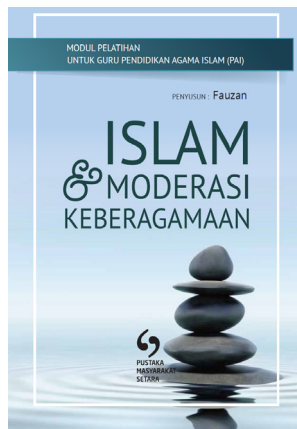
Sementara dalam konteks nasional, SETARA Institute telah memperoleh berbagai pengakuan strategis atas kontribusinya dalam memperkuat tata kelola hak asasi manusia dan keamanan manusia di Indonesia. Di tahun 2024, secara istimewa SETARA Institute menerima Pin Emas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai apresiasi atas perannya yang aktif dalam penanggulangan terorisme melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia. Selain itu di tahun yang sama, SETARA juga dianugerahi penghargaan RAN PE dalam kategori *Program Inovatif dan Berkelanjutan* atas strategi advokasinya yang berhasil memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ekstremisme kekerasan.

Di tingkat nasional, SETARA Institute turut dipercaya menjadi Juri Harmony Award 2025 dan Juri Kasad Award 2023, mencerminkan posisi lembaga ini sebagai rujukan independen dalam penilaian kinerja toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pilar Bisnis dan HAM, SETARA berperan aktif sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM di bawah Kementerian Hukum dan HAM, serta secara konsisten mendorong penerapan prinsip tanggung jawab korporasi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai HAM.

2.2.6. Keterlibatan dalam Advokasi

SETARA Institute telah terlibat aktif dalam berbagai advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan penyelesaian konflik berbasis data dan pengetahuan. Melalui pendekatan yang menggabungkan riset empiris dengan kerja advokasi langsung, SETARA menjembatani hasil penelitian dengan perubahan kebijakan nyata di tingkat nasional maupun lokal. Keterlibatan ini mencakup penyusunan berbagai dokumen kebijakan strategis, pendampingan kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, serta kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat prinsip keadilan, inklusivitas, dan hak asasi manusia di Indonesia.

1. ADVOKASI KEBIJAKAN BERBASIS DATA DAN PENGETAHUAN



Riset bagi SETARA Institute bukan hanya sarana untuk memahami realitas sosial, tetapi juga alat strategis untuk mendorong perubahan kebijakan dan memperkuat kapasitas masyarakat sipil. Melalui pendekatan *evidence-based advocacy*, SETARA memastikan setiap rekomendasi, intervensi, dan kampanye publik berakar pada temuan empiris yang kuat dan analisis kritis yang mendalam. Dari isu kebebasan beragama, reformasi sektor keamanan, hingga pencegahan ekstremisme kekerasan, riset SETARA berfungsi sebagai fondasi bagi advokasi yang terukur, berorientasi hasil, dan memiliki legitimasi moral.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, SETARA juga mengembangkan modul-modul penguatan kapasitas yang dirancang dari hasil riset dan pengalaman advokasi di lapangan. Modul-modul ini menjadi sarana pembelajaran bagi komunitas masyarakat sipil, aparat pemerintah, dan kelompok muda untuk memperkuat perspektif hak asasi manusia, toleransi, dan inklusi sosial. Dengan cara ini, pengetahuan yang dihasilkan dari riset tidak berhenti di ruang akademik, tetapi mengalir menjadi energi perubahan di tingkat praksis—mendorong masyarakat menjadi aktor aktif dalam memperkuat demokrasi dan kemanusiaan.

Terdapat berbagai advokasi lainnya yang

dilakukan SETARA Institute dengan basis riset-riset yang dilakukan sebelumnya, seperti: advokasi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan toleransi di tingkat siswa melalui dokumen kebijakan tentang status toleransi siswa SMA/ sederajat, melakukan penyusunan draft dan lobi tentang Rancangan Perpres PKUB, mendorong percepatan penyusunan dan implementasi dokumen kebijakan dan akselerasi RAN PE Fase II dan RAD PE maupun Dokumen Kebijakan Akselerasi Adopsi RAD PE, lalu mendorong tata kelola pemerintahan inklusif melalui penyusunan modul dan *Policy tools*: pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif, serta Policy tools: Pedoman Penyusunan Adopsi Inklusi Sosial Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kemudian juga menyusun *Policy brief*: pembangunan rumah ibadah dan *Policy brief*: penguatan kohesi sosial, Mengembangkan *Case Tracking System (CTS)*, sebuah basis data daring untuk memantau kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, Konsultasi nasional untuk korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, Advokasi terhadap RUU Kehidupan Beragama, RUU Keamanan Nasional, RUU Organisasi Kemasyarakatan, dll, hingga SMS Gateway: laporan cepat pelanggaran KBB.

2. PENDIDIKAN PUBLIK

Pendidikan publik menjadi salah satu pilar penting dalam kerja perubahan SETARA Institute. Melalui berbagai bentuk kegiatan seperti lokakarya, pelatihan, kampanye sosial, penerbitan modul, dan diskusi terbuka, SETARA berupaya menanamkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada masyarakat luas. Pendidikan publik bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga proses

pembentukan kesadaran kritis agar warga negara mampu memahami hak-haknya, menghargai perbedaan, dan aktif menjaga ruang publik yang inklusif.

Pendekatan pendidikan yang dikembangkan SETARA selalu berbasis pada hasil riset dan pengalaman advokasi di lapangan. Dengan demikian, setiap materi yang disampaikan bukan

hanya konseptual, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial dan tantangan kebangsaan aktual. Program pendidikan publik ini telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat—dari mahasiswa, aparat lokal, tokoh agama, hingga kelompok minoritas—membangun jembatan dialog dan memperkuat kapasitas aktor-aktor lokal dalam memperjuangkan keadilan dan toleransi.

Sejumlah pendidikan publik dilakukan SETARA sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat sipil, terutama anak muda, agar dapat mengambil peran kuat dalam pemajuan toleransi maupun penguatan demokrasi, seperti:

peningkatan kapasitas lebih dari 150 anak muda di 8 kabupaten/kota yang berasal dari kelompok rentan mengenai HAM dan toleransi, Peningkatan kapasitas terhadap aparat pemerintah tentang Tata Kelola Pemerintahan Inklusif, Peningkatan pemahaman mengenai kebijakan pro bisnis dan HAM dalam pengawasan obat dan makan bagi staf dan ASN di lingkungan BPOM, *Workshop* bagi 13 pemerintah daerah untuk akselerasi penyusunan RAD PE, *Workshop* bagi 15 pemerintah daerah untuk pengarusutamaan tata kelola pemerintahan inklusif dalam RPJMD, Peningkatan kapasitas bagi guru dan penyuluh agama, dan masih banyak lagi.

3. FASILITASI DIALOG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Fasilitasi dialog merupakan salah satu pendekatan strategis SETARA Institute dalam mendorong penyelesaian konflik sosial dan memperkuat kohesi kebangsaan. Dalam berbagai kasus intoleransi, ketegangan sosial, maupun sengketa berbasis identitas, SETARA memilih jalur dialog sebagai ruang pertemuan yang aman dan produktif bagi para pihak. Dialog bukan sekadar pertukaran pendapat, tetapi proses rekonsiliasi sosial yang berangkat dari pengakuan terhadap perbedaan dan kebutuhan untuk membangun keadilan bersama.

Pendekatan dialog yang dikembangkan SETARA menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Indonesia tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum atau keamanan. Ia memerlukan ruang kemanusiaan—tempat di mana empati, keadilan, dan saling pengertian menjadi fondasi utama. Dengan cara ini, SETARA berkontribusi pada terbentuknya tata sosial yang lebih inklusif, di mana perbedaan bukan sumber ancaman, melainkan kekuatan bagi demokrasi yang hidup.

Sejumlah fasilitasi dialog dalam penyelesaian konflik yang SETARA lakukan dan/atau terlibat, di antaranya dialog dalam akselerasi penyelesaian kasus GKI Yasmin di Bogor, fasilitasi pengakuan bagi penghayat kepercayaan pada kolom agama dalam dokumen kependudukan, pendampingan JAI Manislor untuk memperoleh KTP, pendampingan JAI Sintang, fasilitasi pendirian masjid Jabal Nur Manado, fasilitasi penyelesaian kasus Tanjungbalai, pendampingan penyelesaian kasus Asyura di Bandung, fasilitasi pendirian masjid Muhajirin Tomohon, pendampingan kasus penyegelan masjid Ahmadiyah Depok, fasilitasi penyelesaian kasus Gereja Santa Clara Kota Bekasi, fasilitasi kasus pengungsian JAI di Mataram, fasilitasi kasus pengungsian Syiah Sampang di Sidoarjo, fasilitasi penyelesaian kasus HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi, fasilitasi penyelesaian kasus Gereja POUK Tesalonika, fasilitasi penyelesaian kasus JAI di Lombok Timur.

4. STRATEGIC ENGAGEMENT DENGAN SEKTOR PEMERINTAH, PUBLIK DAN SEKTOR PRIVAT/SWASTA DALAM SKEMA PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP

Dalam dua dekade perjalanannya, SETARA Institute memahami bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui keterlibatan strategis lintas sektor. Oleh karena itu, SETARA mengembangkan pola strategic engagement dengan sektor pemerintah, publik, dan swasta dalam kerangka *public-private partnership (PPP)* yang berorientasi pada penciptaan ekosistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Bersama sektor pemerintah, SETARA berperan sebagai mitra kritis—memberikan masukan berbasis riset terhadap kebijakan publik, memperkuat tata kelola yang akuntabel, dan membangun kapasitas institusi negara agar lebih responsif terhadap prinsip-prinsip hak asasi

manusia. Dalam ruang ini, SETARA tidak sekadar menjadi pengawas, tetapi juga katalis reformasi kebijakan dan transformasi kelembagaan.

Sejumlah kemitraan strategis yang dilakukan SETARA, baik bersama elemen pemerintah maupun swasta, di antaranya kolaborasi SETARA dengan PT Nikomas Gemilang untuk peningkatan kapasitas tentang pengarusutamaan prinsip-prinsip EDI (*equality, diversity, and inclusion*) dalam pengelolaan bisnis, kolaborasi dengan PT Unilever untuk pengarusutamaan DEI, Kolaborasi dengan BNPT RI dalam perumusan Rencana Aksi dan akselerasi penyelesaian Rancangan Perpres RAN PE Fase II, dan Kolaborasi riset dengan BPIP mengenai inklusi sosial di Indonesia.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG MASA KINI

Selama dua dekade perjalanan memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, SETARA Institute telah menempuh jalan yang tidak selalu mudah. Di tengah perubahan politik yang cepat, penyusutan ruang kebebasan sipil, serta menguatnya konservatisme sosial, SETARA menghadapi tantangan besar untuk menjaga independensi, relevansi, dan keberlanjutan kerja-kerja advokasinya. Tantangan ini bukan sekadar persoalan eksternal, tetapi juga menyangkut bagaimana lembaga masyarakat sipil dapat terus beradaptasi dengan ekosistem pengetahuan dan kebijakan publik yang kian kompleks. Terdapat 4 lokus yang menjadi tantangan SETARA Institute dalam perjalanan riset dan advokasinya:

3.1. HUMAN RIGHTS, DEMOCRACY AND PEACE DI FORA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Momentum utama dalam internalisasi prinsip Bisnis dan HAM dimulai pada tahun 2011, ketika UNGPs pertama kali diperkenalkan sebagai norma global yang otoritatif dalam menangani dan mengatasi dampak buruk HAM akibat dari operasionalisasi perusahaan. Jauh sebelum itu, diskursus untuk menautkan HAM dalam operasionalisasi bisnis telah berkembang sejak tahun 1980 dan mencapai puncaknya pada akhir abad ke 20, yang ditandai dengan munculnya beberapa tren, yang antara lain:

- a. Meningkatnya rantai pasok global.
- b. Meningkatnya kesadaran terhadap ketimpangan global (global inequality).
- c. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap eksploitasi dan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

Dalam kerangka ini, penting bagi SETARA Institute untuk memahami konteks keterhubungan antara isu keberlanjutan (sustainability issues) dan 17 target SDGs dalam satu kanal untuk identifikasi peluang intervensi program. Peran NGOs dalam promosi isu bisnis dan HAM, secara umum terbagi ke dalam 3 kategori utama:

a. Watchdog

Peningkatan kesadaran publik dan pasar terkait pentingnya penerapan uji tuntas HAM mengukur tingkat kepatuhan (*compliance*) perusahaan (*sustainability and traceability standards*) seperti *EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*, menciptakan peluang bagi NGO untuk secara kreatif dan progresif untuk menguji strategi advokasi dan mengubah perilaku perusahaan seputaran isu HAM.

b. Perimbangan kekuasaan (*Balance of Power*)

NGOs memosisikan diri sebagai aktor masyarakat sipil yang berperan penting dalam menjaga perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) di tengah dinamika demokrasi Indonesia. Melalui riset, advokasi kebijakan, dan pendidikan publik, NGOs berupaya memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks politik yang

seringkali diwarnai konsentrasi kekuasaan dan lemahnya mekanisme pengawasan, NGOs hadir sebagai suara korektif yang berbasis pada bukti dan analisis kritis.

c. Katalisator

NGOs dapat berperan dalam mengasistensi perusahaan untuk menerapkan standar-standar HAM pada salient human rights issues, seperti ketika perusahaan teridentifikasi lemah dalam isu keselamatan pekerja dan pekerja anak. Maka, NGOs dapat mengambil peran dalam mendorong terpenuhinya aspek HAM tersebut.

d. Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Dalam mendorong penerapan prinsip bisnis dan HAM, NGOs dapat berperan sebagai kelompok penekan dengan mengedepankan naming and shaming, begitu pun *knowing and showing* terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM.

3.2. STRATEGI KOMUNIKASI DAN GAGASAN KREATIF UNTUK Mendukung ISU HAM, DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN

Poin penting dari komunikasi dan gagasan kreatif adalah tentang bagaimana menyebarluaskan pesan dan informasi, dalam konteks visi dan nilai organisasi sebagai upaya untuk pemenuhan core issue kelembagaan dalam rangka penguatan Demokrasi dan HAM. Penentuan strategi komunikasi dan gagasan kreatif menjadi pondasi mendasar untuk public engagement dan penyadaran publik.

Walaupun, kerja strategi komunikasi dan gagasan kreatif merupakan kerja yang sangat teknis, namun, dalam penentuan substansi, pemetaan target audience, tema dan jenis publikasi merupakan bagian dari kerja yang membutuhkan analisa dan pengetahuan yang mumpuni.

3.3. DEMOKRASI, HAM DAN KEAMANAN DALAM PERSPEKTIF KE-INDONESIA-AN

Hal paling krusial untuk memperoleh respons organisasi masyarakat sipil adalah fakta regresi demokrasi yang terjadi dalam konteks Indonesia terkini, sebagaimana diindikasikan dengan temuan berbagai lembaga riset, yang dapat di highlights sebagai berikut:

- a. 62,9% orang Indonesia takut mengungkapkan pendapatnya (Indikator Politik, 2022).
- b. Skor kebebasan sipil turun dari 32 pada 2019 menjadi 29 pada 2021 (*Freedom House*, 2021).
- c. 43% orang Indonesia enggan berpendapat tentang isu-isu politik (LSI, 2019).

- d. Indeks Kebebasan Pers Indonesia turun: dari skor 62,60 (2021) ke 49,27 (2022). Indonesia yang tahun lalu peringkat ke-113 dari total 180 negara, akhirnya merosot ke peringkat ke-117 (RSF).
- e. SETARA Institute mencatat skor kebebasan berekspresi dan berpendapat terendah di tahun 2022 dibanding indikator pemajuan HAM yang lain -- nilai 1,5 dari rentang nilai 1- 7.

Sementara, bentuk dari regresi demokrasi dapat dikategorisasikan, dalam dua spektrum utama yakni Regresi Demokrasi dari Atas dan Regresi Demokrasi dari Bawah.

Regresi Demokrasi dari Atas	Regresi Demokrasi dari Bawah
<ol style="list-style-type: none"> a. Praktik-praktik represif oleh alat negara untuk menekan dan membatasi kritik b. Pengaruh pemerintah pusat atas pemerintahan daerah yang semakin kuat c. Penurunan Kualitas Partai Politik Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Polarisasi masyarakat sipil di Indonesia dan sikap afirmatif penerapan taktik otoriter oleh negara terhadap saingan ideologis mereka.

Sebagai kanalisasi aktivitas riset dan advokasi, pada prinsipnya penguatan Demokrasi, HAM dan Keamanan dilandasi oleh keterpenuhan atas nilai-nilai berikut:

- a. Equality Citizenship
- b. Rule of Law
- c. Human Dignity

3.4. TANTANGAN MEWUJUDKAN KEMANUSIAN, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN DI PAPUA

Terdapat beberapa isu yang mengemuka terkait dengan kondisi Papua, yang menuntut perhatian banyak pihak, termasuk SETARA Institute, yaitu:

- a. Dekadensi kualitas HAM di Papua.
 - b. Mobilisasi aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan di Papua.
 - c. Jalan pemulihan atas pelanggaran HAM di Papua yang belum tersedia, baik *willingness* maupun instrumen yang fair dan berkeadilan.
 - d. Meningkatnya kooptasi intelijen dengan merangkul generasi muda di Papua.
 - e. Diskriminasi rasial yang terus meningkat, khususnya antara warga Papua dan non-Papua.
 - f. Meningkatnya konservatisme gereja, khususnya di wilayah pegunungan Papua.
 - g. Kebijakan *Food Estate* yang diinisiasi Jokowi berpotensi menimbulkan masalah sosial, lingkungan dan lain sebagainya.
 - h. Meningkatnya jumlah grup-grup Islam konservatif-Salafi dan Wahabi di Papua.
 - i. Regenerasi aktivis Papua yang tidak berjalan dengan baik.
 - j. Stagnasi inisiasi Papua Tanah Damai.
1. Para pendiri SETARA memiliki profil tinggi.
 2. Engagement dan rapport SETARA dengan negara (pemerintah pusat dan daerah) baik.
 3. Unsur pimpinan selain memiliki basis pengalaman, juga memiliki basis akademik yang mumpuni, sehingga menjadi nilai tambah dalam kredibilitas riset yang dihasilkan.
 4. SETARA memiliki produk riset yang telah di-acknowledge baik oleh negara maupun non-negara, bahkan menjadi rujukan, baik untuk kepentingan penulisan akademik maupun penyusunan kebijakan negara.
 5. Secara jaringan dan reputasi pada isu Demokrasi dan HAM, terkhusus KBB, SETARA Institute berada pada level kuadran pengaruh yang tinggi sebagai kelompok masyarakat sipil.
 6. Memiliki barisan peneliti yang memiliki concern kajian masing-masing, serta kemampuan adaptasi terhadap isu-isu di luar concernnya dengan baik.
 7. SETARA memiliki beberapa annual report prominen yang secara konsisten dan berkelanjutan menjadi rujukan stakeholders negara dan non-negara, serta berdampak pada upaya advokasi tertentu.
 8. Secara umum engagement media sosial SETARA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini berarti kampanye yang dilakukan SETARA cukup berdampak pada audience.
 9. Image brand media sosial SETARA sudah mulai terbangun.
 10. *Key visual* dan *key message* sudah mulai terlihat dengan jelas yang menunjukkan identitas SETARA di media sosial.

Namun demikian, di balik beragam tantangan sebelumnya, terdapat ruang-ruang yang menjadi peluang SETARA di masa depan. Sebab, sejak awal berdirinya, SETARA tidak hanya berperan sebagai pengamat demokrasi, melainkan sebagai aktor aktif yang mendorong perubahan berbasis data, argumentasi ilmiah, dan komitmen etik. Secara langsung, terdapat berbagai **aspek kekuatan** yang dapat dimanfaatkan SETARA di masa depan, sebagai berikut:

11. *Equipment multimedia* yang cukup untuk keperluan dapur produksi kampanye digital.
12. Cukup aktif memproduksi konten di media sosial. Contents yang dibuat oleh SETARA memiliki perkembangan yang cukup signifikan baik dari aspek kuantitas dan kualitas.
13. SETARA memiliki jaringan kelembagaan (Negara dan JMS) yang cukup baik dan dipercaya di berbagai daerah.
14. Citra SETARA di kalangan media sangat reputable dan citable sehingga coverage media SETARA relatif tinggi.
15. Pada satu titik tertentu, SETARA sudah dapat dikategorikan sebagai lembaga think tank.
16. Memiliki akuntabilitas manajemen keuangan yang baik.
17. Memiliki SOP Keuangan yang menjadi panduan untuk operasionalisasi keuangan yang baik bagi kelembagaan.
18. Ekspektasi pihak eksternal terhadap SETARA sangat tinggi.[]

Bab IV

Kisah Perubahan (*Impact Stories*)

Selama dua dekade perjalanan, SETARA Institute telah berkontribusi menjadi salah satu kekuatan moral dan elemen masyarakat sipil yang konsisten dalam membentuk arah demokrasi Indonesia. Sejak awal, SETARA lahir dari kesadaran bahwa demokrasi tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dijaga, diperkukuh, dan terus diperbarui melalui kerja pengetahuan, advokasi, dan keberanian moral.

Perubahan yang dihasilkan SETARA bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan perubahan paradigmatis: dari politik yang eksklusif menuju politik yang inklusif, dari kebijakan yang reaktif menuju tata kelola yang berbasis hak asasi manusia, serta dari wacana toleransi yang normatif menuju praktik kebhinekaan yang substantif. Melalui riset-riset yang kuat secara metodologis, advokasi yang berakar pada data, dan pendidikan publik yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, SETARA telah mendorong pergeseran cara pandang negara dan masyarakat terhadap isu-isu kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan.

Perubahan-perubahan maupun kontribusi tersebut direkam melalui testimoni dari berbagai mitra SETARA, sebagai berikut:

1. “Terima kasih SETARA Institute telah memberikan manfaat bagi advokasi kebijakan yang berfokus pada bidang toleransi, pluralisme, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, rule of law, bisnis & HAM, serta human security.” — **Komjen Pol Prof. Dr. H. Mohammad Rycko Amelza Dahniel, M.Si. (Kepala BNPT RI 2023 - 2024)**
2. “Kami terus terang diarahkan langsung Bapak Mendagri, Bapak Jenderal Tito Karnavian, sangat memberi apresiasi terhadap upaya masyarakat sipil khususnya SETARA Institute, yang telah mengembangkan model pengukuran yang namanya Indeks Kota Toleran. Mungkin satu-satunya yang tersedia hari ini, ada model pengukuran Indeks Kota Toleran di

dunia yang dikembangkan oleh SETARA Institute. Maka SETARA Institute bukan saja mendapat apresiasi dari kita, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Indonesia, tetapi juga mendapat apresiasi dari dunia internasional karena ini luar biasa kerja akselerasinya dengan menghasilkan sebuah model pengukuran dengan paradigma positif.” — **Dr. Drs. Bahtiar, M.Si (Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI)**

3. “SETARA Institute tidak hanya berperan besar dalam advokasi untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang toleran, tetapi juga telah menyediakan data penting yang berkontribusi terhadap penelitian akademik. Indeks Kota Toleransi memberikan indikator yang objektif dan dapat dibandingkan secara nasional setiap tahun. Studi pengukuran seperti ini, yang mengumpulkan data pada tingkat kota, tidak memiliki padanan lain dan, menurut saya, merupakan kegiatan yang sangat bermakna, baik bagi Indonesia maupun bagi masyarakat internasional.” — *Shimada Yuzuru (Professor, the Dean Graduate School of International Development, Nagoya University, Japan)*
4. “Kota Singkawang sebenarnya kota kecil, yang barangkali jika tidak melalui IKT, orang mungkin tidak kenal, apalagi banyak dikunjungi. Oleh karena itu, kami terus terang menyampaikan bahwa kami berhutang budi dengan SETARA Institute. Dengan penilaian IKT, Singkawang mempunyai berkah yang luar biasa. Kami mendapatkan CSR pembangunan bandar udara Singkawang tahun 2024 senilai 150M. Saya tidak bisa membayangkan kalau Singkawang tampil dengan wajah-wajah intoleran, mempunyai banyak konflik, apalagi dengan alasan yang tidak jelas, katakanlah berbau SARA dan lain-lain, tidak akan mungkin datang rezeki sebesar 150M untuk pembangunan bandar udara Singkawang yang diresmikan oleh Presiden pada bulan Maret 2024.” — *Drs. H. Sumastro, M.Si (Sekretaris Daerah Kota Singkawang 2018 - 2025)*
5. “Konflik pembangunan rumah ibadah gereja GKI Yasmin Kota Bogor sejak 2006 dan dapat diselesaikan setelah terjadi kesepakatan relokasi dan pembangunan ulang gereja di lokasi baru pada 2023, 15 tahun penantian penyelesaian merupakan kemenangan Indonesia menghilangkan citra buruk dan mengangkat citra Kota Bogor menjadi Kota Toleransi. SETARA institute sangat mendukung memberi motivasi dalam pelatihan tata kelola pemerintahan inklusif tahun 2022 kepada perangkat daerah terkait, sehingga selain IKT Kota Bogor naik dari peringkat 33 tahun 2021 menjadi peringkat 12 tahun 2023. Melalui SETARA, Kota Bogor telah menginspirasi penerbitan Perda Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kota Bogor Ramah HAM dan merevisi regulasi daerah lainnya yang diskriminatif dan sampai saat ini menjadi penguatan Kota Bogor sebagai Kota Peduli HAM.” — **Alma Wiranta, SH., MSi(Han) (Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor (2019 -2025))**

6. “Program yang dijalankan oleh Koalisi Aspirasi dengan dukungan Setara Institute pada tahun 2024 benar-benar memberi ruang yang luas bagi kami untuk menyesuaikan kegiatan dengan konteks lokal, sehingga program ini terasa relevan. Melalui Setara, kami bisa terlibat lebih jauh dalam proses pemilu, mendorong isu-isu kelompok marjinal masuk ke ruang debat kandidat, sehingga publik mengetahui sikap dan arah kebijakan para calon.

Selain itu, program ini juga membuka peluang untuk mengangkat isu lintas sektor dan mempertemukan berbagai lembaga agar dapat berkolaborasi dalam satu tujuan. Fleksibilitas yang diberikan Setara memungkinkan mitra mengelola kegiatan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, sejalan dengan kondisi politik, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini memperkuat semangat keberagaman aspirasi dari masyarakat dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif.” — **Rizkika Lhena Darwin (Koordinator Koalisi ASPIRASI Aceh)**

7. “Bagi saya, SETARA adalah teman berjuang karena sejak awal mengenal SETARA, saya merasa ada jiwa, spirit, dan ruh yang sama untuk memberikan hal-hal yang baik. Penelitian-penelitian SETARA banyak menjadi sumber referensi saat saya mengajar maupun saat melakukan *sounding* ke masyarakat. Bahkan, saya selalu merekomendasikan riset-riset SETARA kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan isu-isu yang terkait dengan toleransi, demokrasi, HAM. Walaupun tidak selalu bekerjasama dengan Setara, tapi nilai-nilai SETARA -yang mengajarkan inklusivitas, keberagaman, dan perbedaan agama suku bahasa yang tidak boleh dijadikan alasan untuk saling judgement atau saling berburuk sangka- selalu saya bawa saat memberikan pandangan terutama dalam forum-forum keluarga atau parenting dan kajian pada komunitas ibu-ibu.” — **Ernawati (Dosen Psikologi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta).**

8. “Pertama kali saya mengenal Setara Institute ketika saya masih menjadi korban peristiwa Cikeusik. Seiring waktu saya menjadi Penyintas korban untuk memperjuangkan keluarga Jai agar tidak terus -terusan menjadi korban persekusi. Saat itu perjuangan saya muncul salah satunya terinspirasi oleh lembaga Setara. Mereka hadir bukan hanya sebagai lembaga advokasi, tetapi juga sebagai ruang aman yang memberi kami kekuatan pemahaman intelektual akan sebuah kasus. Dari perjumpaan itu, lahirlah wadah yang kelak dikenal

sebagai Sobat KBB (Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama). Sobat KBB bukan sekadar komunitas, tetapi sebuah rumah bersama yang menghimpun solidaritas korban KBB. Di sinilah kami belajar bahwa suara yang terpecah akan mudah dipatahkan, tetapi ketika disatukan menjadi kekuatan kolektif, ia bisa mengguncang ketidakadilan.

Bersama Setara Institute, saya kemudian menapaki jalan yang lebih jauh, tidak hanya mengadvokasi kasus, tetapi juga membangun kajian bersama PB Jai terhadap praktik persekusi terhadap JAI. Dari kajian inilah, pengalaman pahit yang kami alami diolah menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi senjata untuk mencegah pengulangan persekusi serupa di masa depan. Perjalanan ini membuat saya semakin sadar: perjuangan atas nama Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama bukan sekadar soal hak kelompok tertentu, melainkan tentang martabat manusia yang universal. Dan dalam perjalanan ini, Setara Institute menjadi saksi bahwa luka bisa berubah menjadi kekuatan, dan persekusi bisa melahirkan solidaritas.” — **Ahmad Masihuddin (Penyintas Korban Cikeusik)**

9. “Setara Institute telah membuktikan bahwa melalui komitmen, kerja serius dan konsistensi, lembaga ini semakin rujukan berbagai pihak dalam pembangunan HAM di Indonesia. Secara lebih khusus, lembaga ini juga telah menghasilkan dampak nyata dalam memperkuat iklim toleransi dan keberagaman di tanah air.” — **Muhammad Subhi (Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif)**

10. “Selama dua dekade, SETARA telah menjadi pelopor advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, memerangi diskriminasi serta memupuk toleransi di tengah tantangan fundamentalisme. Kontribusi gemilang SETARA telah memperkaya demokrasi inklusif Indonesia. Semoga ke depan, SETARA terus menginspirasi perubahan berkelanjutan, memperkuat harmoni antarumat beragama untuk masyarakat yang lebih adil dan damai. Terima kasih atas dedikasi tak kenal lelah.” - **Dr. Abdul Waidl, M.A (INFID Program Manager)[]**

BAB V

AGENDA 2045 DAN VISI KE DEPAN

5.1. RENCANA STRATEGIS 2023-2026

Pilar/Isu	Tujuan Strategis	Inisiatif yang dibutuhkan/ Program	Mitra Strategis
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dan P/ CVE	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat otoritas keilmuan dan kapasitas SDM organisasi dalam melakukan riset dan advokasi untuk pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan. - Mendorong bertambahnya regulasi yang mendukung pemenuhan KBB. - Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas KBB. - Memperkuat daya tahan (resiliensi) masyarakat dari pengaruh propaganda intoleransi dan radikalisme. - Mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dalam isu KBB. - Mendorong ekosistem toleransi dan ekosistem gerakan masyarakat sipil yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi laporan FoRB. - Produksi laporan Indeks Kota Toleran. - Pelembagaan kepemimpinan inklusif dan tata kelola pemerintahan inklusif. - Penyediaan ruang <i>knowledge sharing</i> antar pemerintah daerah. - Penguatan jaringan internasional dan advokasi internasional FoRB. - Penguatan <i>Local Reformis Group</i> sebagai <i>prominent actors</i> mewujudkan ekosistem toleransi. - Penyusunan standar penanganan kasus pelanggaran KBB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Dalam Negeri - SEAFORB - Kementerian Agama - Kementerian Luar Negeri - BPIP - PKUB - Komnas HAM - Komnas Perempuan - Pemerintah Daerah - Asosiasi Pemerintahan Daerah - DPD RI - NGOs

Pilar/Isu	Tujuan Strategis	Inisiatif yang dibutuhkan/ Program	Mitra Strategis
Bisnis dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun ekosistem <i>knowledge sharing</i> di kalangan jaringan masyarakat sipil tentang Bisnis dan HAM. - Mendorong penguatan regulasi di sektor Obat dan Pangan untuk mewujudkan kepatuhan (<i>compliance</i>) perusahaan terhadap standar-standar HAM dalam operasionalisasi bisnis. - Mendorong penyusunan regulasi mandatory pada tingkat peraturan perundang-undangan tentang penerapan Uji Tuntas HAM dalam mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. - Mendorong peningkatan kapasitas aparaturnegara, non-negara, dan entitas bisnis dalam isu bisnis dan HAM. - Menguatnya peran lembaga negara independen dan peradilan dalam proses penegakkan remediasi berbasis <i>grievance mechanism</i>. - Mendorong keterbukaan perusahaan (<i>disclosure</i>) terhadap standar-standar keberlanjutan. - Meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pemenuhan standar-standar keberlanjutan dalam kerangka <i>self regulatory (HR Policy, Human Rights Report Progress, HRIA, Business based Grievance mechanism)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kajian tematik dan penyusunan <i>annual report</i> pada isu bisnis dan HAM secara periodik. - Keterlibatan aktif bersama jaringan dan kelompok masyarakat sipil. - Advokasi dan konsultasi publik pada kementerian/ lembaga terkait untuk pengarusutamaan konsep-konsep Bisnis dan HAM. - Advokasi media pada peluncuran riset terkait dengan ketertelusuran rantai pasok. - Memformulasi <i>tools</i> atau <i>guidance</i> bagi entitas negara dan pemerintah dalam penerapan prinsip Bisnis dan HAM. - Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan <i>training</i> HAM pada perusahaan dan negara. - Penyediaan <i>tools</i> dan <i>guidance</i> bagi aktor negara dan bisnis untuk proses remediasi. - Pelatihan peningkatan pemahaman kapasitas aktor negara dan non-negara dalam proses remediasi. - Pelatihan dan <i>promoting</i> pada perusahaan terkait dengan standar-standar keberlanjutan dan dokumen-dokumen uji tuntas HAM. - Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengakses proses remediasi <i>non states based grievance mechanism</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPOM RI - Komnas HAM - Kementerian HAM - Komnas Perempuan - RSPO - OJK - NGOs - BPIP

Pilar/Isu	Tujuan Strategis	Inisiatif yang dibutuhkan/ Program	Mitra Strategis
Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas organisasi dan jaringan masyarakat sipil di bidang Reformasi Sektor Keamanan, Keamanan Manusia, dan Keamanan Digital. - Mengarusutamakan kerangka Keamanan Manusia dalam melanjutkan agenda reformasi sektor keamanan. - Mendorong penguatan Keamanan Manusia sebagai pendekatan dalam persoalan di Papua. 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi riset tematik dalam isu Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Manusia - Dialog lintas organisasi Jaringan Masyarakat Sipil, terutama yang memiliki <i>concern</i> pada bidang Reformasi Sektor Keamanan dan Keamanan Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemhannas RI - Polri - Kementerian HAM - Komnas HAM - Kompolnas - Jaringan Masyarakat Sipil Papua - Nawasena - BPIP
Rule of Law	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas SDM organisasi dalam melakukan riset dan advokasi untuk penegakan <i>rule of law</i>. - Mendorong terwujudnya reformasi legislasi yang partisipatif. - Menkuatkan konsolidasi bersama masyarakat sipil untuk tanggap dalam mengawal mulai dari proses hingga implementasi regulasi. - Menkuatkan jaringan bersama civitas akademika baik untuk kepentingan riset maupun mobilisasi advokasi. - Mendorong realisasi komitmen negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. - Memperkuat komitmen penegakan hukum oleh penyelenggara negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengaktifkan sinergi dengan kampus sebagai partner kolaborasi baik untuk kepentingan riset maupun advokasi. - Memproduktifkan kajian riset tematik isu <i>rule of law</i>. - Memproduksi <i>landmark research</i>. - Meningkatkan konsolidasi dalam setiap penyikapan atas isu dinamis yang terjadi. - Melakukan rangkaian <i>strategic intervention</i> dan advokasi kebijakan pada isu-isu yang menjadi perhatian organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPR RI - Mahkamah Konstitusi - Kementerian HAM - NGOs - BPIP

Pilar/Isu	Tujuan Strategis	Inisiatif yang dibutuhkan/ Program	Mitra Strategis
IT dan Social Media	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat virtual branding organisasi. - Mengembangkan konten yang lebih menarik dengan menggunakan kalimat aktif. - Membangun kolaborasi dengan NGO yang berhubungan dengan SETARA - Meningkatkan <i>engagement</i> publik di media sosial dengan kolaborasi dengan <i>influencer</i> dan <i>media partner</i>. - Mengoptimasi media sosial organisasi menjadi media yang interaktif dan edukatif. - Menggalang dukungan publik untuk isu/program yang terkait dengan <i>core issue</i> organisasi di media sosial. - Memanfaatkan ruang-ruang kolaborasi secara daring untuk <i>delivery</i> gagasan yang dimiliki organisasi. - Konsolidasi ide kampanye strategis lintas organisasi. - Menjadikan organisasi sebagai rujukan data dan informasi mengenai area riset yang dimiliki organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan <i>social media plan</i> organisasi. - Melakukan kolaborasi ide/konten dengan jaringan NGO lain. - Meningkatkan <i>engagement</i> media sosial lembaga. - Menyampaikan ide/ gagasan/ produk organisasi dengan visualisasi yang komunikatif dan kreatif. - Meningkatkan interaksi media sosial lembaga dengan <i>audience</i>. - Memantau kondisi perangkat IT yang dimiliki organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - IT Expert - LKBN ANTARA - Meta - Google

5.2. AGENDA RISET DAN ADVOKASI STRATEGIS KE DEPAN

5.2.1. Indeks Kota Toleran 2025

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) merupakan hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia. Indeks Kota Toleran 2025, nantinya akan menjadi publikasi ke-9 SETARA Institute sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015. Sebelumnya IKT telah dipublikasikan pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Indeks Kota Toleran adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Kombinasi ini ditujukan untuk memotret secara lebih komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum. Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasikan anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

5.2.2. Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2025

Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) sebagai indeks pengukuran pertama mengenai inklusi sosial akan terus dikembangkan melalui studi lanjutan yang dilakukan oleh SETARA Institute untuk menelaah kondisi inklusi di 100 kabupaten di Indonesia. Pemilihan kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dinamika pembangunan yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, kelompok minoritas agama atau kepercayaan, keberadaan masyarakat adat sebagai salah satu subjek penelitian, ketersediaan data, serta pengalaman daerah dalam melaksanakan inisiatif pemajuan inklusi sosial secara sistematis dan multipihak.

Fokus pada wilayah kabupaten didasarkan pada temuan Studi IISI tahun 2024 yang mencakup 22 kota dan 2 kabupaten, di mana hasilnya menunjukkan bahwa wilayah kabupaten relatif lebih rentan dan memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi tantangan dalam pemajuan inklusi sosial. Karena itu, studi lanjutan ini akan memperdalam kajian di wilayah kabupaten guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Studi ini tidak membatasi periode pengukuran, melainkan berupaya mendokumentasikan seluruh capaian daerah dalam membangun *baseline* yang utuh mengenai kondisi inklusi sosial di wilayah penelitian.

5.2.3. Konferensi Kota Toleran (November 2025)

Konferensi Kota Toleran (KKT) adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh SETARA Institute dalam rangka mengamplifikasi pembangunan ekosistem toleransi sekaligus sebagai respon atas kebutuhan tindak lanjut atas riset Indeks Kota Toleran. Sebagai studi pengukuran yang dilakukan untuk mempromosikan praktik-praktik baik toleransi kota-kota di Indonesia, IKT telah berhasil mendorong kota-kota untuk bergegas membangun ekosistem toleransi di daerahnya masing-masing.

Pada level nasional, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi atas riset IKT dan memandang pentingnya IKT sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi kerja-kerja pemajuan toleransi di daerah. Demikian pula beberapa kementerian/ lembaga lain, BNPT dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menjadikan riset IKT sebagai salah satu basis dalam penyelenggaraan beberapa program mengenai isu toleransi di lingkungan pendidikan.

5.2.4. BHAM dengan Univ Haluoelo (Oktober 2025)

Studi *Responsible Mining* (Pertambangan yang Bertanggung Jawab) di sektor nikel di Sulawesi Tenggara merupakan inisiatif riset yang dilakukan oleh SETARA Institute untuk menelaah secara komprehensif praktik pertambangan nikel dari perspektif lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan hak asasi manusia. Studi ini bertujuan mengidentifikasi praktik yang berlangsung saat ini, menganalisis kesenjangan antara pelaksanaannya dengan standar global dan regulasi nasional, serta memetakan risiko dan dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.

Melalui pendekatan berbasis data, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pertambangan nikel yang

lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus membangun ruang dialog antara pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal guna memastikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

5.2.5. Pengukuran Toleransi dan Harmoni di Kabupaten Mimika (2025-2030)

SETARA Institute bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bekerja sama dalam program *Pengukuran Toleransi dan Harmoni* di Kabupaten Mimika yang mencakup serangkaian kegiatan, antara lain riset dan penelitian mengenai tingkat toleransi serta harmoni masyarakat Mimika, penyelenggaraan seminar hasil riset dan publikasi penelitian, serta pelaksanaan berbagai program lanjutan yang berfokus pada pemajuan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kehidupan sosial yang inklusif di tingkat lokal.

5.2.6. IKT Kabupaten Muara Enim

Indeks Kota Toleran (IKT) Kabupaten Muara Enim merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan SETARA Institute dalam upaya mengukur serta memperkuat praktik toleransi di tingkat lokal. Riset atau pengukuran toleransi di Muara Enim ini telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga kini, dan berpotensi terus hingga 2030. Melalui kerja sama ini, SETARA memberikan dukungan teknis dan metodologis dalam proses penilaian serta penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk membangun kebijakan yang berpihak pada inklusi sosial, kebebasan beragama, dan keharmonisan antar warga. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan data empiris mengenai kondisi toleransi di Muara Enim, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pluralisme ke dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adil dan inklusif.[]



BAB VI

PENUTUP DAN PESAN KEBERLANJUTAN

Dua puluh tahun perjalanan SETARA Institute adalah kisah tentang keyakinan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan pernah tumbuh tanpa keberanian untuk berpihak pada kemanusiaan. Sejak awal berdiri pada 2005, SETARA hadir bukan sebagai penonton dari dinamika bangsa, melainkan sebagai penggerak perubahan— dan menyalakan nalar kritis di tengah arus populisme dan intoleransi.

Selama dua dekade ini, SETARA juga telah bertransformasi menjadi rumah bagi gagasan-gagasan besar tentang kebebasan, pluralisme, dan hak asasi manusia. Melalui riset, advokasi, dan pendidikan publik, SETARA memperluas cakrawala demokrasi Indonesia—membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk penguatan kapasitas dan berpartisipasi lebih aktif, serta membantu negara untuk menata kembali relasi kekuasaan dengan prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perjalanan ini tentu tidak tanpa tantangan. SETARA tumbuh di tengah naik-turunnya iklim kebebasan, di bawah tekanan politik, dan di antara dinamika sosial yang kerap tidak ramah terhadap perbedaan. Namun justru dari situ, kekuatan sejati SETARA terbentuk. Dua dekade bukanlah akhir, melainkan pondasi untuk melangkah lebih jauh. SETARA kini memandang masa depan dengan semangat yang sama seperti ketika ia dilahirkan: semangat untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta memperluas cakrawala toleransi dan keadilan sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks, SETARA akan terus menjadi sumber pengetahuan yang kritis dan ruang moral yang memelihara nurani publik.

Karena itu, pesan keberlanjutan SETARA jelas: perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada satu generasi. Ia harus diteruskan, diperluas, dan diperkaya. Ke depan, SETARA akan memperkuat kapasitas kelembagaan dan inovasi pengetahuannya, membangun kolaborasi lintas disiplin dan lintas batas, serta memperluas ruang partisipasi generasi muda agar nilai-nilai kesetaraan dan toleransi terus hidup di masa depan. SETARA juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan finansial dan moral, agar tetap menjadi lembaga yang independen, kredibel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Keberlanjutan bagi SETARA tidak semata berarti menjaga eksistensi kelembagaan, melainkan memastikan nilai-nilai perjuangan tetap hidup lintas generasi. Ini menuntut pembaruan strategi, regenerasi pemimpin, serta adaptasi terhadap konteks sosial dan teknologi baru tanpa kehilangan integritas dan prinsip dasar. SETARA akan terus mengembangkan riset-riset yang relevan dengan isu kontemporer, memperkuat jejaring nasional dan global, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat sipil agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem, melainkan budaya yang berakar.

Pada momentum dua dekade ini, SETARA Institute menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada para pendiri yang telah menyalakan obor pertama perjuangan ini, dan kepada seluruh staf, peneliti, dan aktivis yang dengan ketekunan dan keberanian menjaga nyala api itu tetap hidup. Terima kasih juga kepada para mitra nasional dan internasional, donor, serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini menjadi rekan seperjalanan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dan yang tak kalah penting, penghargaan tertinggi diberikan kepada publik, para warga yang menjadi sumber inspirasi dan tujuan akhir dari setiap kerja SETARA — karena dari merekalah semangat kesetaraan dan kemanusiaan mendapatkan maknanya.[]

think ■
act ■
tolerate ■

